

**UPAYA BENAZIR BHUTTO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEREMPUAN DALAM POLITIK PAKISTAN TAHUN 1988-1990**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

HUSNUL UMMAHAT SABIR

14323056

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

HUSNUL UMMAHAT SABIR

14323056

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Benazir Bhutto Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Pakistan Tahun 1988-1990

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal
18 Oktober 2018

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

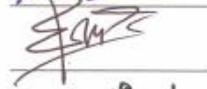
Ketua Program Studi


Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

Dewan Penguji

1. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A.
2. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.
3. Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

Tanda Tangan


HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Husnul Ummahat Sabir
No. Mahasiswa : 14323056
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Upaya Benazir Bhutto Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Pakistan Tahun 1988-1990

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagai mana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang menyatakan,



Husnul Ummahat Sabir

HALAMAN PERSEMBAHAN



Yang utama dari segalanya.....

Untuk semua cita dan harapan, puji syukur kehadiran Allah SWT.

Terima kasih Ya Allah atas segala yang Engkau hadirkan untuk mewarnai hidupku dan Engkau gariskan menjadi takdir dalam hidupku. Terima kasih Ya Allah untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan dalam penghujung awal perjuanganku. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada

Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini, sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih tiada tara kepada orang yang sangat aku sayangi dan cintai serta yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku

“ Kedua Orang Tuaku Tersayang ”

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Sabir Kadda dan Rosdiati

Terima kasih teruntuk ayah dan bunda yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tak pernah putus. Kata-kata ayah dan bunda yang selalu memotivasi telah membuatku dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Karena do'a dan harapan ayah bunda, aku dapat menyelesaikan studiku dengan baik.

Terima kasih atas perjuanganmu dalam mendidik, merawat dan mendukung segala langkahku. Semoga ini menjadi langkah awal anakmu untuk berjuang, dan membuat kalian bangga dan bahagia.

HALAMAN MOTTO

*“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah
hingga ia pulang”*

HR. Turmudzi

*“ It is very important to know who you are. To make decisions. To show who you
are”*

Malala Yousafzai

“Life is too short to spend worrying about people who opposed you”

Benazir Bhutto

*“Banyaknya kerikil-kerikil di tengah jalan menuju kesuksesan akan memberikan
pembelajaran bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan tidak selalu berjalan
mulus. Maka dari itu, teruslah berusaha memberikan yang terbaik dan capailah
kesuksesan tersebut”*

Husnul Ummahat Sabir

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, yang tidak pernah putus mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi untuk terus belajar dan berjuang. Ayah dan Bunda adalah alasanku untuk berjuang dan terus belajar serta melawan rasa malas untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepadaku selama aku menuntut ilmu dan selalu memberikan do'a terbaik dalam segala kegiatanku. Terima kasih telah mempercayaku dalam segala hal dan selalu memotivasiku bahwa aku bisa melakukan apapun dengan baik. Insya Allah, Vivid akan menjadi anak yang selalu menjadi kebanggaan Ayah dan Bunda, serta yang akan mengangkat derajat kalian kelak. Sehat-sehat terus ya Ayah dan Bunda. Semoga Ayah dan Bunda selalu dibawah lindungan Allah SWT.
2. Husnul Ummahat Sabir (diriku sendiri), yang bisa bangkit dari zona nyaman selama proses penyelesaian skripsi dan mampu menghadapi serta berjuang dari segala macam rintangan. Pengalaman adalah pelajaran yang

sangat berharga, sehingga dapat membentuk kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.

3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan nasehat dan bimbingan yang membangun kepada penulis selama ini sehingga proses skripsi yang dapat menjadi lebih mudah dan terarah. Terima kasih telah menyisihkan waktu untuk bimbingan skripsi di sela-sela waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat, saya meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat dan semoga bapak selalu berada di bawah lindungan Allah SWT.
5. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, selaku Dosen Pembimbing alternatif dalam proses penulisan skripsi yang telah membimbing dan memberikan kritik substansi dalam proses penulisan skripsi. Mohon maaf jika telah memberikan kerja tambahan dan merepotkan dengan berbagai pertanyaan. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.
6. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas bimbingan, pendampingan, dan saran yang telah bapak berikan selama 4 tahun studi saya di HI UII. Saran yang diberikan oleh bapak sangat membantu saya dalam menjalankan studi saya menjadi lebih baik lagi. Semoga bapak selalu berada dibawah lindungan Allah SWT.
7. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen pembimbing pertama saya yang telah membimbing dan memberikan nasehat bagi segala kebingungan dan keluhan selama menjalankan kuliah dan menyusun skripsi. Mohon maaf jika selama ini

telah menjadi mahasiswa yang merepotkan dengan berbagai pertanyaan dan keluhan. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.

8. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., selaku Kaprodi dan dosen, yang senantiasa memberikan nasihat yang membangun serta memberikan banyak motivasi. Serta dosen-dosen HI UII khususnya dan tanpa terkecuali, Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan serta seluruh dosen-dosen UII. Terimakasih atas ilmu, arahan dan kesabarannya selama kurang lebih empat tahun ini. Bagi saya, bapak dan ibu adalah dosen-dosen yang luar biasa. Semoga apa yang telah bapak dan ibu berikan dapat menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sukses terus untuk bapak dan ibu dosen tercinta.
9. Keluargaku, yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan memberikan dukungan atas segala apa yang telah ku cita-citakan. Terima kasih karena telah menjadikanku sebagai sosok yang terus termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
10. Sarini, yang tidak pernah capek dalam memberikan dukungan serta ikut serta membantu dalam proses penyelesaian skripsiku. Terima kasih atas waktu yang selalu diberikan kepada saya demi memberikan segala macam bantuan dan motivasi sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan berkat dirimu. Semoga segala yang kamu cita-citakan dapat terwujud dan segala urusanmu selalu dimudahkan. Pokoknya terima kasih

selalu ada di setiap moment lika-liku kehidupanku selama ini hehehe. Maafkan diriku yang selalu menyusahkanmu. See you on the top! Always be my best sister ya, beb! Much of love from me...

11. Afifah Sausan Mizhari, yang senantiasa menemaniku dari semester 1 hingga sekarang. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita baik itu akademik maupun non-akademik. Terima kasih juga selalu ada disetiap moment dalam hidupku selama di Jogja. Maaf selalu merepotkanmu, San hehehe. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin hingga kapanpun ya. Sukses buat kamu ya San dan semoga segala urusanmu akan dimudahkan. See you on the top! Me love you...

12. Ina Nafilla dan Aufa Andiani Aziz, yang senantiasa menjadi tempatku mengeluarkan segala bentuk unek-unekku. Terima kasih atas segala waktu kalian untuk saya selama ini. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin hingga kapanpun. See you on the top. Saranghae...

13. Genk 'Hobi Makan' (Regina,Rosyi,Faheem,Fariz,Bayu), yang selalu menjadi teman makan, teman curhat (segala macam bentuk curhat), teman travelling dll. Terima kasih telah menjadi teman yang baik hati dan tidak sombong, selama aku berada di Jogja. Maaf jika selama ini aku ada salah-salah kata ke kalian ya. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin hingga kapanpun itu. Sukses terus buat kita. See you on the top! Me love you so much, guys!

14. RLT, yang selalu memberikan do'a dan dukungannya sehingga penulis bisa lebih bersemangat dengan banyaknya dukungan dari kalian. Semoga

pertemanan kita yang dari SMP ini bisa tetap terjalin hingga kapanpun. Semoga persahabatan kita akan terus memberikan manfaat satu sama lainnya. Semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Good luck for us. Miss you so much, guys!

15. Diaz, Neni, Fiqah, dan Cakra, yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis bisa lebih bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin hingga kapanpun dan selalu memberikan manfaat satu sama lain. So glad to be your friend! Semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Good luck for us! Semoga segala yang kita cita-citakan dapat terwujud. Miss you so much, guys!

16. Teman seperjuangan sekaligus teman se-DPSku (Vikram dan Bintar), yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan sehingga beban-beban berat selama proses penyelesaian skripsi ini bisa kita pikul sama-sama. Kalian luar biasa, bisa menyelesaikan drama dengan cerita-cerita yang juga sangat luar biasa. Semoga drama kita bertiga dapat memberikan motivasi kepada yang lainnya ya, guys. Terima kasih atas waktu kalian untuk mendengarkan segala unek-unekku selama ini. Jangan lupa drama ini harus kita ceritakan ke anak dan cucu kita ya kelak, biar mereka tau kalau kita ada pejuang skripsi sejati hehehe. Jangan lupa juga keep in touch setelah lulus nanti ya. Good luck for us! Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

17. Mardiatul Khasanah, yang selama ini telah membantu dalam memberikan informasi dan membantu mengurus segala keperluan administrasi di HI. Thank you so much Mbak Diahku, you're the best ever. Sukses terus ya mbakku.
18. Teman-teman HI angkatan 2014, terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi saya. Kalian adalah teman-teman luar biasa. Senang bisa menjadi bagian dari kalian. Terima kasih telah mewarnai dan menemani selama empat tahun ini. Terima kasih telah menjadi pemicu semangat buat saya. Sukses untuk kita semua.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan doanya.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Oktober 2018

Husnul Ummahat Sabir

DAFTAR ISI

UPAYA BENA ZIR BHUTTO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK PAKISTAN TAHUN 1988-1990	1
HALAMAN ESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Signifikansi	4
1.5. Cakupan Penelitian.....	6
1.6. Kajian Pustaka.....	7
1.7. Landasan konseptual	14
1.7.1. <i>Women Empowerment Concept</i>	14
1.8. Metode Penelitian.....	18
1.8.1. Jenis Penelitian.....	18
1.8.2. Subjek Penelitian.....	18
1.8.3. Alat Pengumpul Data	19
1.8.4. Proses Penelitian	19
BAB II	21
FAKTOR PENDORONG YANG MEMPENGARUHI BENA ZIR BHUTTO	21
MELAKUKAN PERUBAHAN POLITIK DI PAKISTAN	21
2.1. Realitas Partisipasi Perempuan Dalam Politik Era Sebelum Benazir Bhutto .	22
2.2. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Rendahnya Partisipasi Perempuan Era Sebelum Benazir Bhutto	25
2.2.1 Sejarah Diskriminasi di Pakistan	26
2.2.2. Budaya Patriarki di Pakistan	31
2.2.3. Pembunuhan Politik	35
BAB III.....	41

ANALISIS <i>WOMEN EMPOWERMENT</i> DALAM UPAYA BENAZIR BHUTTO UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK PAKISTAN 1988-1990	41
1.1. Personal Empowerment	41
1.1.1. Latar Belakang dan Pembentukan Pemikiran Benazir Bhutto	42
1.2. Rational Empowerment.....	46
1.3. Collective Empowerment.....	48
3.3.1 Kebijakan Benazir Bhutto	48
3.4. Efektivitas Upaya Penguatan Gender Oleh Benazir Bhutto.....	56
BAB IV	61
PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran dan Rekomendasi	63
Daftar Pustaka.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Perbedaan hukum hudood menurut Islam dan menurut Zia Ul-Haq ..	33
Tabel 2.2.2 Persentasi partisipasi perempuan dalam pendidikan era sebelum Benazir Bhutto (<i>Journal of International Women's Studies, 2016</i>).....	33
Tabel 3.3.1 Persentasi partisipasi perempuan dalam pendidikan era Benazir Bhutto (<i>Journal of International Women's Studies, 2016</i>)	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.2 Lingkaran emansipasi gender dalam kebijakan Benazir Bhutto33

ABSTRAK

Pakistan adalah salah satu negara di Asia Selatan, serta dibangun berlandaskan Islam. Kebijakan yang dikeluarkan harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Namun, militer mendominasi untuk mengawasi jalannya sistem pemerintahan di Pakistan. Hal inilah yang menjadikan kondisi Pakistan semakin tidak aman, angka diskriminasi terus bertambah, budaya patriarki yang muncul di tengah-tengah masyarakat Pakistan serta pembunuhan politik yang kerap terjadi. Namun terpilihnya Benazir Bhutto pada tahun 1988 sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Pakistan, berhasil melunturkan budaya patriarki di tengah-tengah masyarakatnya. Melalui pendekatan *women empowerment* akan melihat bagaimana proses Benazir dalam meningkatkan kesadaran perempuan-perempuan di Pakistan agar bisa menyuarakan hak-haknya yang selama ini tidak terdengarkan di pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang pendidikan dan masa lalunya membentuk Benazir dalam pembuatan kebijakannya. Sehingga di dalam kepemimpinannya, Benazir ingin mencapai nilai demokrasi di Pakistan dengan berusaha meningkatkan angka partisipasi perempuan di dalam perpolitikan Pakistan. Namun sebelum mencapai nilai demokrasi tersebut, Benazir berusaha menghapuskan angka diskriminasi terhadap perempuan dan juga memperbaiki sistem pendidikan di Pakistan.

Kata kunci: *Pakistan, diskriminasi, budaya patriarki, Benazir Bhutto, women empowerment.*

ABSTRACT

Pakistan is one of the countries in South Asia, and is built based on Islam. The policies that formed must be based on the Qur'an and Hadiths. However, the military dominated to oversee the running of the government system in Pakistan. These was the reason that turned the condition of Pakistan increasingly insecure, the number of discrimination continues to increase, patriarchal culture that arises in the midst of Pakistani society and the frequent political killings. But the election of Benazir Bhutto in 1988 as the first female Prime Minister in Pakistan, succeeded in eliminating patriarchal culture in the midst of her community. Through the women empowerment approach, we will see how Benazir succeed in increasing women's awareness in Pakistan so that they can stand for their rights which have not been heard in the previous government. Benazir formed her policies based on her educational background and past. So that in her leadership, Benazir wanted to achieve democratic values in Pakistan by trying to increase the rate of women's participation in Pakistani politics. But before that, Benazir tried to eliminate the number of discrimination against women and also improve the education system in Pakistan

Key words: *Pakistan, discrimination, patriarchal culture, Benazir Bhutto, women empowerment*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pakistan adalah salah satu negara yang ada di Asia Selatan yang lebih dikenal sebagai negara yang lahir atas semangat nasionalisme Islam. Namun dalam hal ini, Pakistan juga dikenal sebagai negara yang kurang stabil dalam perpolitikan. Sejak tahun 1958 negara Pakistan dikuasai oleh militer (Sumairs, 2007). Namun pada masa pemerintahan Zia Ul Haq, kekuasaan militer meningkat tinggi di Pakistan dan hal inilah yang membuat dunia politik di Pakistan semakin keras. Partai politik tidak berjalan efektif dan perempuan tidak diperbolehkan untuk aktif dalam dunia politik. Berawal dari masa itu, kekerasan banyak terjadi dan juga kudeta militer telah menjadi tradisi di Pakistan.

Awal dari kekerasan dan kudeta militer pada masa pemerintahan Zia Ul-Haq yang menjadikan dunia politik di Pakistan menjadi tidak stabil (Ali, Tragedi Benazir Bhutto, 2008, p. 84). Militer banyak memegang kekuasaan di negara Pakistan, yang dibuktikan dengan banyaknya perang antara militer dan sipil yang akhirnya memberikan pengaruh terhadap sejarah politik di Pakistan. Praktek pembunuhan politik di Pakistan lazim terjadi di kalangan politikus dan tidak pernah mendapatkan titik terang mengenai siapa aktor di balik pembunuhan politik di sana. Akan tetapi beberapa dari pemerhati politik memandang bahwa militer dan aparat keamanan di Pakistan yang banyak memegang peran di balik kasus tersebut, namun teroris akan menjadi salah satu aktor untuk dijadikan pengalihan isu tersebut (Weaver, 2008).

Politik yang keras dan pembunuhan politik terhadap politikus di Pakistan membuat keberadaan Benazir Bhutto sebagai politikus perempuan pertama menjadi warna baru dalam politik di Pakistan. Partisipasi perempuan dalam politik serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan menjadi tantangan di Pakistan. Namun kenyataannya bentuk-bentuk dari kekerasan dan diskriminasi gender sudah menjadi kebiasaan di Pakistan. Kekerasan tersebut juga banyak terjadi di dalam lingkup politik, baik itu sasarannya terhadap laki-laki maupun perempuan. Namun kekerasan politik di Pakistan selalu dirasakan oleh perempuan, sebab posisi perempuan yang minoritas di kalangan politik. Pembunuhan-pembunuhan politik yang selalu terjadi, selain ayah Benazir Bhutto hingga Benazir Bhutto itu sendiri, tercatat ada beberapa politikus yang menjadi korban dari pembunuhan politik di Pakistan. Salah satunya ialah menteri kesejahteraan sosial yang mana menterinya ialah seorang perempuan, Zille Huma Usman yang dibunuh pada tahun 2007 (Elashi, 2014).

Pakistan adalah salah satu negara yang jumlah partisipasi politik perempuannya masih sedikit. Politik di Pakistan lebih didominasi oleh kedudukan laki-laki dibandingkan perempuan. Melihat dari posisi tersebut, perempuan dalam keikutsertaan dalam dunia perpolitikan sangat kurang. Pada tahun 1988, kuota untuk perempuan tercatat hanya berjumlah 3% yang ditugaskan di legislatif. Setiap periode kuota untuk perempuan lebih minim dibandingkan kuota untuk laki-laki di dalam kursi pemerintahan (Awan M. A., 2016, pp. 1-2). Data tersebut menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam perpolitikan Pakistan sangat besar. Selain hal tersebut, keterlibatan perempuan memiliki tantangan lain ketika berada dalam dunia politik. Tantangan bagi perempuan

Pakistan yaitu dapat mengurangi angka kekerasan, terutama kekerasan seksual yang terjadi di Pakistan (Indonesia, 2008). Perempuan yang berada dalam dunia politik Pakistan diharapkan dapat memberikan warna baru untuk perempuan-perempuan Pakistan.

Rendahnya partisipasi politik di Pakistan salah satunya disebabkan oleh nilai patriarki yang dianut di negara tersebut. Adanya ketidaksetaraan gender ini membuat kedudukan perempuan di Pakistan dapat melemahkan posisinya dalam bermasyarakat dan juga sangat rentan dengan kekerasan. Banyaknya kekerasan yang dialami oleh perempuan Pakistan karena disebabkan oleh masih lemahnya hukum untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan (Dearden, 2016). Sehingga setiap tahunnya angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Kekerasan yang berbasis gender ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, karena posisi perempuan yang di posisikan sangat rendah dibandingkan laki-laki. Nilai patriarki ini juga banyak disalahgunakan oleh beberapa orang yang mengaitkannya dengan agama, sehingga menjadi kontrol yang sangat kuat untuk membatasi perempuan dalam melakukan aktivitasnya (Tarar & Pulla, 2014, p. 57).

Benazir Bhutto hadir di tengah-tengah kondisi Pakistan yang sangat keras terhadap perempuan. Tidak mudah bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi ke dunia politik Pakistan, karena diskriminasi perempuan yang masih kerap terjadi di sana. Sebagai perempuan pertama yang terjun ke perpolitikan Pakistan, sangat penting jika melihat kembali hal-hal yang melatar belakanginya untuk ikut serta ke dalam politik. Bakat politik Benazir Bhutto sebelum ayahnya digulingkan oleh Zia Ul-Haq belum terlalu tampak akan tetapi setelah ayahnya digantung pada

tahun 1979, yang membuatnya bangkit dan berjuang dalam politik untuk mengembalikan martabat keluarganya (Munif, 2007, p. 23).

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, telah dijelaskan bahwa Pakistan adalah negara yang memiliki politik yang belum stabil, seringkali terjadi pembunuhan politik, partisipasi perempuan yang masih kurang karena masyarakat Pakistan masih menganut nilai patriarki, serta kemunculan Benazir Bhutto ke dalam politik Pakistan yang sangat keras. Maka dari penjelasan latar belakang di atas dapat ditarik pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana upaya Benazir Bhutto dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik Pakistan pada tahun 1988-1990?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat perkembangan partisipasi perempuan dalam politik di Pakistan.
2. Untuk mengetahui latar belakang Benazir Bhutto dalam partisipasinya ke dalam politik Pakistan pada tahun 1988 hingga 1990.

1.4. Signifikansi

Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat perkembangan partisipasi perempuan dalam politik Pakistan. Sebab, Pakistan adalah negara yang memiliki partisipasi perempuan yang sangat rendah. Namun di tengah minimnya partisipasi perempuan ke dalam politik di Pakistan, Benazir Bhutto muncul sebagai perempuan pertama yang terjun ke dalam perpolitikan Pakistan. Maka dari itu, penulis juga ingin melihat apa yang melatarbelakangi Benazir Bhutto untuk ikut

serta ke dalam perpolitikan keras di Pakistan. Penelitian ini dianggap penting karena melihat Pakistan adalah negara yang masih menganut nilai-nilai patriarki yang mana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun, Benazir Bhutto berhasil melunturkan nilai-nilai patriarki di Pakistan. Penulis akan mencoba menganalisa penelitian ini dengan menggunakan teori *Women Empowerment*, yang mana akan melihat upaya yang dilakukan Benazir untuk mengubah struktur-struktur yang ada di masa pemerintahan sebelum era Benazir Bhutto. Penelitian dalam melihat upaya Benazir dalam meningkatkan partisipasi perempuan ini belum banyak yang meneliti secara spesifik pada periode pertama. Benazir Bhutto menjadi Perdana Menteri yaitu pada tahun 1988 hingga tahun 1990. Hal ini yang menyebabkan penulis lebih fokus pada periode ini, sebab pada periode pertama Benazir Bhutto berhasil menjadi Perdana Menteri di tengah-tengah kondisi Pakistan yang masih menganut nilai patriarki. Nilai patriarki yang dianut di Pakistan ini ialah masih menjunjung tinggi kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dibandingkan posisi perempuan yang cenderung tidak terlalu diperhatikan hak-haknya. Dengan adanya penelitian ini akan menunjukkan bahwa dengan nilai patriarki yang ada di Pakistan tidak membuat Benazir Bhutto mengurungkan niatnya menjadi perdana menteri. Sehingga dengan kehadirannya dapat menunjukkan bahwa beberapa masyarakat Pakistan masih bisa membuka pemikirannya terhadap keberadaan perempuan dalam partisipasinya ke dalam dunia politik Pakistan.

1.5. Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan fokus membahas mulai dari tahun 1988 hingga tahun 1990, yang mana pada periode tersebut ialah periode pertama Benazir Bhutto menjadi politikus di Pakistan. Alasan penulis memilih periode pertama ialah karena pada periode tersebut Benazir Bhutto banyak menemukan tantangan pada saat sebelum menjabat sebagai politikus hingga ia terpilih dan melihat partisipasi perempuan dalam politik pasca Benazir Bhutto menjabat. Penelitian ini akan menganalisa tantangan Benazir Bhutto yang menjadi politikus pertama perempuan yang bisa terpilih menjadi perdana menteri di tengah kondisi Pakistan yang masih menganut nilai-nilai patriarki. Benazir Bhutto dengan semangat yang tangguh mampu meyakinkan rakyat Pakistan bahwa ia bisa memimpin di Pakistan dan akan membawa perubahan di negaranya. Sebelum Benazir Bhutto hadir sebagai politikus perempuan pertama, Pakistan dikenal sebagai negara yang sangat membatasi aktivitas perempuan. Sehingga kajian ini dianggap penting karena melihat Pakistan yang keras terhadap perempuan bisa memperbolehkan Benazir Bhutto yang dalam hal ini menjadi politikus pertama perempuan dan berhasil menjadi perdana menteri. Di akhir periode ini juga, Benazir Bhutto sempat diasingkan oleh presiden yang pada saat menjabat, ialah Zia Ul-Haq. Dalam sejarah keluarga Bhutto, Zia Ul-Haq memang sudah tidak asing lagi, dimulai pada saat Zulfikar Ali Bhutto yang divonis hukuman gantung pada era Zia Ul-Haq lalu ia juga berhasil menyingkirkan Benazir Bhutto dari kursi perdana menteri dan harus diasingkan ke Paris selama 7 tahun.

1.6. Kajian Pustaka

Dengan melihat latar belakang keluarga Benazir Bhutto yang menggeluti dunia politik, Mary meneliti bahwa hal tersebut menjadikan motivasi Benazir untuk menjadi politikus, yang mana buku tersebut berjudul "*Benazir Bhutto: Pakistani Prime Minister and Activist*" (Englar, 2006). Buku ini menjelaskan bahwa pada saat itu rakyat Pakistan banyak yang hidup dalam kemiskinan dan bahkan tidak bisa bersekolah. Larangan perempuan saat itu tidak diperbolehkan sekolah. Namun melihat hal itulah yang menjadikan Benazir Bhutto perempuan yang berani dan kuat dalam memperjuangkan hak-hak rakyatnya dan juga memperjuangkan perempuan agar bisa melakukan aktivitas seperti layaknya laki-laki. Sebelum terpilih menjadi Perdana Menteri, Benazir Bhutto banyak mempengaruhi perempuan-perempuan Pakistan untuk mulai berani menyuarakan hak-haknya. Dan setelah terpilih, beberapa perempuan mulai berani untuk ikut serta dalam politik dan ikut membantu Benazir Bhutto untuk menyuarakan hak-hak perempuan yang ada di Pakistan. Buku ini banyak menjelaskan tentang hal-hal yang melatarbelakangi Benazir Bhutto untuk menjadi politikus di negara yang tidak ramah perempuan. Karena kejadian seperti ini dikatakan sangat jarang ditemukan di negara yang masih menganut nilai patriarki. Akan tetapi buku ini hanya fokus membahas latar belakang dan tidak banyak membahas pergerakan politik Benazir Bhutto pada periode pertama.

Tulisan Hussain yang berjudul "*The Assassination of Benazir Bhutto*" (Hussain, 2008, p. 27), dapat melengkapi tulisan Mary yang dalam buku ini menjelaskan tentang perjalanan politik Benazir Bhutto dari awal hingga pada tahun 2007. Buku ini menceritakan sejarah perpolitikan keluarga Bhutto, dimulai

dari pada masa jabatan ayahnya hingga pada saat Benazir Bhutto menjabat. Namun perjalanan politik yang dijalani Benazir Bhutto mendapatkan banyak rintangan, baik itu dari lawan politiknya maupun dari rakyat Pakistan yang bukan berasal dari pendukungnya. Namun karena Benazir selalu dalam bayang-bayang pembunuhan ayahnya, yang membuat Benazir tumbuh menjadi politikus yang berani. Masa-masa jabatan Benazir yang tidak berjalan mulus karena ia banyak dituduh atas tindakan korupsi, sehingga ia harus menerima masa tahanan kepada dirinya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan keinginan Benazir Bhutto untuk tetap menjadi politikus demi mengembalikan martabat keluarganya. Akan tetapi di dalam buku yang ditulis oleh Yassir ini hanya menjelaskan sebagian besar sejarah politik Benazir Bhutto hingga pada saat ia terbunuh. Yassir juga banyak menambahkan pandangan-pandangan presiden dari belahan dunia terhadap pembunuhan Benazir Bhutto. Kebijakan-kebijakan dan partisipasi perempuan dalam politik Pakistan masih kurang terlihat dalam buku ini.

Pemikiran yang sama dengan penulis sebelumnya, di dalam buku yang ditulis oleh Zaenal Ali yang berjudul "*Tragedi Benazir Bhutto*" (Ali, 2008, p. 60). Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana perjalanan karir Benazir Bhutto sebagai politikus di Pakistan. Meskipun mendapatkan banyak dukungan akan tetapi ia juga banyak mendapatkan pertantangan dari beberapa kalangan. Selama masa jabatannya Benazir mencoba mengurangi angka kemiskinan yang sudah meluas di Pakistan akan tetapi hal tersebut sangat sulit diwujudkan. Namun diantara beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Benazir Bhutto yang diantaranya adalah kesetaraan gender, kesehatan dan mengurangi angka diskriminasi terhadap perempuan, kebijakan dalam kesetaraan genderlah yang

terlihat banyak memberikan perubahan. Perempuan-perempuan di Pakistan sudah mulai bisa melakukan aktivitas yang sama dengan laki-laki, serta bisa menyuarkan hak-haknya yang selama ini tidak pernah terdengarkan. Buku ini sudah menjelaskan mengenai pergerakan politik Benazir Bhutto dalam hal partisipasi politik perempuan di Pakistan, akan tetapi isi dari buku ini belum terlalu spesifik sehingga pembahasannya masih meluas.

Ketertarikan Heraldo Munoz dalam melihat keberanian Benazir Bhutto yang dapat berpartisipasi di perpolitikan Pakistan, yang kemudian ia jadikan sebagai penelitiannya yang berjudul “*Getting Away with Murder: Benazir Bhutto’s Assassination and the Politics of Pakistan* (Munoz, 2014, pp. 18-19). Buku ini menjelaskan mengenai perjalanan politik Benazir Bhutto yang penuh dengan perjuangan. Keberanian Benazir Bhutto untuk masuk ke dunia politik disebabkan karena ia menyaksikan sendiri ketika ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto yang dihukum gantung pada saat pemerintahan Zia Ul-Haq. Melihat kejadian tersebut mengubah Benazir Bhutto menjadi sosok yang berani dalam mengeluarkan pendapat-pendapatnya di depan umum. Dengan kegigihannya itu membuat Benazir Bhutto dinobatkan sebagai tokoh yang paling penting dan pemimpin yang sangat dihormati dalam perpolitikan Pakistan. Selain itu, ia juga banyak memperjuangkan hak-hak perempuan yang mana hal ini menjadi keberhasilannya karena perempuan-perempuan Pakistan mengalami kemajuan dan mereka bisa menyuarkan hak-haknya di parlemen.

Sependapat dengan Heraldo Munoz, hal ini juga disampaikan oleh Rafiq Zakaria dalam bukunya yang berjudul “*The Trial of Benazir*” (Zakaria, 1989). Buku ini menjelaskan tentang Benazir Bhutto yang terus menerus memperlihatkan keberaniannya dalam dunia politik. Bukan hanya itu, Benazir Bhutto juga dianggap lebih berani dalam memberikan kritik terhadap pemimpin yang tidak menjalankan kewajibannya untuk kesejahteraan rakyat Pakistan. Hal ini juga mempengaruhi perempuan-perempuan Pakistan yang berada dalam dunia politik Pakistan untuk berani mengungkapkan apa yang berhak mereka ungkapkan dan juga meberikan warna baru dalam dunia politik di Pakistan agar dapat menempatkan perempuan setingkat dengan laki-laki. Buku-buku di atas sudah banyak menjelaskan latar belakang Benazir Bhutto dalam dunia politik di Pakistan akan tetapi belum menjelaskan secara spesifik pada tahun 1988 hingga 1990. Posisi penulis akan fokus pada periode tersebut, yang mana pada tahun itu merupakan periode pertama Benazir Bhutto sebagai politikus di Pakistan dan juga saat itu Benazir Bhutto mendapatkan banyak tantangan politik dari lawan politiknya terdahulu.

Hampir selaras dengan buku yang ditulis oleh Heraldo Munoz yang berbicara tentang masa pemerintahan Zia Ul-Haq, Shireen Burki dalam bukunya yang berjudul “*The Politics of State Intervention: Gender Politics in Pakistan, Afganistan and Iran*” (Burki, 2013, pp. 67-68). Buku ini mengemukakan bahwa pada pemilihan tahun 1988, masyarakat Pakistan terutama kaum perempuan berharap besar akan terpilihnya Benazir Bhutto ke dalam kursi pemerintahan. Benazir Bhutto mengeluarkan kebijakan yang salah satunya tentang kesetaraan gender di Pakistan, agar perempuan bisa melakukan aktivitas yang sama seperti

yang dilakukan laki-laki. Akan tetapi, dibawah sistem pemerintahan Zia Ul-Haq perempuan bahkan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang sama dengan laki-laki dan larangan tersebut juga berdampak terhadap posisi Benazir Bhutto yang saat itu menjabat menjadi perdana menteri. Zia Ul-Haq yang ingin menjadikan Pakistan sebagai negara Islam dan menganut norma-norma Islam, namun beberapa masyarakat tidak dapat mendukung kebijakan Zia Ul-Haq yang sebagian dari mereka ialah perempuan. Buku ini banyak menjelaskan mengenai kebijakan yang dikeluarkan Zia Ul-Haq dan dampaknya terhadap perempuan di Pakistan. Namun, buku ini tidak banyak menjelaskan mengenai partisipasi perempuan di Pakistan, setelah masa kepemimpinan Benazir Bhutto di periode pertamanya.

Pada tahun 1990 ialah tahun akhir dari periode pertama masa pemerintahan Benazir Bhutto. Di tahun tersebut, Benazir diturunkan dari kursi Perdana Menteri oleh Presiden yang menjabat pada masa itu ialah Ishaq Khan. Alhasil, Benazir Bhutto tidak dapat melanjutkan kedudukannya sebagai perdana menteri dan kebijakan-kebijakannya untuk memperjuangkan hak perempuan berhenti pada saat itu. Namun keputusan yang dikeluarkan oleh Ishaq Khan ternyata dianggap kurang tepat, karena masyarakat Pakistan menilai bahwa pengganti Benazir Bhutto sebagai perdana menteri yaitu Nawaz Sharif dianggap belum siap dengan kedudukannya tersebut. Pada masa kedudukan Nawaz sebagai perdana menteri, tidak banyak mengurangi kekerasan yang terjadi di Pakistan dan juga tidak memperjuangkan hak-hak perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh Benazir Bhutto. Hal tersebut diungkapkan oleh Mehtab Ali Shah dalam bukunya yang berjudul *“The Foreign Policy of Pakistan: Ethnic Impacts on*

Diplomacy 1971-1994” (Shah, 1997, pp. 59-60). Buku ini menjelaskan mengenai tantangan demi tantangan yang dirasakan oleh Benazir Bhutto hingga pada tahun akhir di periode pertamanya. Buku ini telah melengkapi tulisan sebelumnya yang berbicara mengenai masa jabatan Benazir Bhutto pada awal tahun di periode pertamanya. Namun buku ini tidak membahas mengenai partisipasi perempuan setelah itu, yang mana hal ini yang akan menjadi bahan penelitian penulis.

Tulisan lain dari Ni'matul Husna yang berjudul “*Hak Perempuan Islam Menurut Benazir Bhutto*” (Husna, 2010) yang mana tulisan ini menjelaskan mengenai hak politik perempuan dalam Islam menurut sudut pandang Benazir Bhutto faktor-faktor yang melatarbelakangi dan pengaruh pemikirannya terhadap rakyat Pakistan. Tulisan ini mengutip dari Al-Qur'an yang berbunyi: “*Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan*”. Melihat dari kutipan ini beberapa ada yang menentang dan ada juga yang mendukung, sebab kutipan tersebut selalu diidentikan dengan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Islamisasi yang dianut Pakistan yang banyak menimbulkan ketidaksetaraan gender. Perjuangan Benazir Bhutto untuk mewujudkan negara yang menganut demokrasi agar kesetaraan gender di Pakistan bisa diatasi dan perempuan bisa mendapatkan hak-haknya sama dengan laki-laki. Perbedaan antara tulisan ini dengan posisi penulis ialah tulisan ini banyak menjelaskan hak-hak politik perempuan di Pakistan menurut pandangan Benazir Bhutto dan juga menganalisis berdasarkan Al-Qur'an. Sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap partisipasi perempuan pada politik Pakistan dan melihat pergerakan politik Benazir Bhutto pada periode pertama. Sedangkan di tulisan ini menjelaskan secara garis besarnya saja.

Buku ini yang ditulis sendiri oleh Benazir Bhutto yang berjudul *“Reconciliation: Islam, Democracy and the West”* (Bhutto, *Reconciliation: Islam, Democracy and the West*, 2008) menjelaskan bahwa beberapa orang mengatakan bahwa demokrasi tidak bisa berkembang di negara yang Islam karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam sebuah teori yang mengatakan Islam yang berakarkan otoritas dan juga memperkenalkan kediktatoran. Namun Benazir menolak akan pemikiran tersebut, karena sebagai Muslim yang hidup dalam lingkup demokrasi dan diktator merasa bahwa hal tersebut bisa berjalan secara beriringan. Dengan latar belakang pendidikan yang didapatkannya dari barat, Benazir mencoba memberikan warna baru terhadap Pakistan yaitu memberikan nilai-nilai barat di sistem pemerintahannya. Benazir mengharapkan negara Pakistan bisa menyatukan antara pemikiran yang Islami, demokrasi dan menganut unsur-unsur barat. Benazir yang sering memperjuangkan hak-hak perempuan selain agar perempuan bisa menyuarakan hak-haknya dan juga agar terwujudnya sistem demokrasi di Pakistan. Namun pemikirannya tersebut banyak yang menentang sebab, Pakistan yang masih kuat akan unsur-unsur Islam tidak bisa menggabungkan ketiganya. Buku ini ialah buku yang ditulis sendiri oleh Benazir Bhutto yang isinya menggambarkan kondisi pemerintahan di Pakistan. Penulis akan menjadikan buku ini sebagai referensi ke dalam skripsi ini.

Hampir sama dengan beberapa penelitian sebelumnya, buku yang ditulis oleh Corinne J. Naden yang berjudul *“Leading Women: Benazir Bhutto”* (Naden, 2011, p. 51), mencoba melihat perjalanan Benazir Bhutto dalam dunia politik dan melihat bagaimana Benazir menghadapi lawan-lawan politiknya yang berusaha untuk menurunkannya Benazir Bhutto dari kursi pemerintahan. Namun walaupun

demikian, Benazir sangat berusaha untuk tetap bisa berada dalam politik Pakistan karena masih banyak yang perlu ia benahi dalam perpolitikan di Pakistan termasuk diantaranya partisipasi perempuan. Benazir sering mengatakan bahwa demokrasi di negaranya sudah tidak terlihat lagi karena masyarakatnya tidak diberi kebebasan untuk berbicara. Bukan hanya itu, Benazir beberapa kali menyinggung masa pemerintahan Zia yang tidak memberikan kebebasan terhadap perempuan yang hal itu dianggapnya sangat melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan tulisan-tulisan yang berasal dari beberapa penulis di atas sama-sama menjelaskan mengenai masa kepemimpinan Benazir Bhutto. Akan tetapi tidak spesifik menjelaskan mengenai masa kepemimpinan Benazir Bhutto pada periode pertama yaitu pada tahun 1988 hingga tahun 1990. Hal inilah yang membedakan dengan penelitian ini yang akan lebih fokus membahas masa kepemimpinan Benazir Bhutto pada periode pertama di tahun 1988 hingga tahun 1990. Penulis akan fokus pada periode pertama sebab di periode pertama Benazir Bhutto berhasil menjadi Perdana Menteri di Pakistan yang mana Pakistan masih dikenal sebagai Negara yang menganut nilai patriarki.

1.7. Landasan konseptual

1.7.1. *Women Empowerment Concept*

Landasan yang akan digunakan pada skripsi ini ialah *Women Empowerment concept*. Dalam pemahaman konsep ini, penulis akan fokus terhadap tulisan dari Jo Rowlands yang berjudul "*Questioning Empowerment: Working with Women Honduras*". Dalam tulisan ini Rowlands menjelaskan pandangannya mengenai bagaimana proses di suatu negara dalam pembentukan women empowerment ini.

Rowlands melihat bahwa konsep *empowerment women* ini adalah suatu proses untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan ruang yang lebih besar kepada perempuan untuk berpartisipasi. *Women empowerment* dalam konteks ini adalah perempuan harus diberi ruang untuk berpartisipasi dalam struktur politik dan ekonomi dalam masyarakat. Perempuan diberi kesempatan untuk menduduki kursi kekuasaan, terlibat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Sehingga hal itu akan melahirkan keputusan baru untuk memberi kekuatan terhadap individu atau kelompok-kelompok yang ingin menciptakan perubahan, memberi peluang bagi perempuan untuk berperan dalam struktur politik, ekonomi dan proses pembuatan kebijakan.

Menurut Rawlands, dalam proses empowerment kekuatan atau “power” menjadi indikator penting. Rawlands mengkategorikan “power” tersebut menjadi 4 bentuk, yaitu :

1. *Power over*: mengendalikan kekuasaan, yang mana membawa orang-orang yang tidak terlibat dalam pembuatan keputusan dapat ikut terlibat di dalamnya.
2. *Power to*: Kekuasaan produktif yang mampu menciptakan tindakan atau kemungkinan baru tanpa adanya dominasi. *Power to* ini bertujuan untuk mencapai kepentingan kelompok.
3. *Power with*: Kekuatan yang berasal dari rasa kepemilikan yang lebih besar dalam kelompok dibandingkan dengan jumlah individu yang ada. Memiliki kekuatan, khususnya ketika menghadapi sebuah permasalahan.

4. *Power from within*: Kekuatan itu dibangun dengan adanya kekuatan spiritual yang akan berdampak kepada keikhlasan dan saling menghormati baik untuk diri sendiri ataupun orang lain.

Kekuatan-kekuatan ini memberikan ruang lingkup untuk berbagi dan mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimiliki, sehingga mampu melihat dan merasa memiliki kapasitas untuk bertindak dan memengaruhi dalam pembuatan keputusan. Di sini, kekuatan muncul bukan dari keterlibatan secara dominan, akan tetapi menstimulasi aktivitas individu atau kelompok dengan meningkatkan moral mereka. Dalam *empowerment* tidak seharusnya melakukan konstruksi negatif terhadap sosial, oleh sebab itu orang-orang akan melihat diri mereka sendiri dalam memiliki kapasitas dan hak untuk bereaksi serta memberikan pengaruh dalam membuat kebijakan. Untuk menjalankan *empowerment* itu sendiri, Rawlands mengelompokkan prosesnya menjadi 3 dimensi yaitu:

1. *Personal*: mengembangkan rasa percaya diri dan meningkatkan kapasitas diri.
2. *Rational*: Mengembangkan kemampuan dalam bernegosiasi dan memberikan pengaruh terhadap hubungan satu sama lain serta dalam membuat keputusan.
3. *Collective*: Terlibat dalam struktur politik yang mencakup tindakan kolektif yang berbasis kerjasama daripada kompetisi.

Proses dalam *empowerment* ini akan melihat pengalaman atau sejarah yang berasal dari individu atau kelompok. Sehingga berdasarkan pengalaman

ini dapat mempengaruhi proses dari *empowerment* ini sehingga akan mendorong kekuatan tertentu untuk menghambat tekanan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang dapat menghasilkan kekuatan baru untuk memperoleh adanya *empowerment* di negara tersebut.

Dari pandangan Rawlands tersebut, dirasa sesuai dalam menganalisis penelitian skripsi ini. Konsep *empowerment* ini akan digunakan untuk melihat bagaimana Benazir mampu meningkatkan kesadaran perempuan-perempuan Pakistan untuk bisa ikut serta dalam perpolitikan di negaranya. Sehingga dalam kebijakan yang dikeluarkan Benazir mampu membangkitkan kekuatan terhadap perempuan-perempuan Pakistan untuk bangkit menciptakan perubahan di Pakistan. Hal itulah juga yang mendorong adanya peningkatan partisipasi perempuan di dalam politik Pakistan.

Melalui pemikirannya, Benazir mampu mengubah sistem yang ada di Pakistan. Pakistan yang dulunya menganut budaya patriarki, secara bertahap mulai bisa menerima perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di Pakistan. Proses dalam mencapai *empowerment* di Pakistan oleh Benazir akan dianalisis dengan menggunakan *power over*, *power to* serta *power with* sebagai indikator penting dalam proses empowerment seperti yang telah dikemukakan oleh Rawlands. Ketiga indikator inilah yang membentuk Benazir untuk meningkatkan kesadaran akan pemberdayaan terhadap perempuan di Pakistan. Kemudian analisis skripsi ini akan melihat bagaimana Benazir mendistribusikan kekuatan-kekuatan tersebut melalui tiga dimensi yang ada dalam konsep *empowerment in*, yaitu *personal empowerment*, *collective empowerment*, dan *close relationship*.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metodologi kualitatif yang mana metode ini ialah suatu penelitian yang berbentuk pendekatan atau bisa dikatakan sebagai penelurusan dengan tujuan mengeksplorasi serta memahami suatu gejala yang sentral (Creswell, 2007). Dalam penelitian ini tidak dibutuhkan struktur-struktur di dalamnya sehingga hasilnya tergantung dari informasi yang telah didapatkan sehingga akan berubah sewaktu-waktu sesuai dengan informasi yang ada. Pengumpulan data-data dari metode ini yang berupa empiris ialah seperti sejarah, studi kasus, pengalaman individu, hasil observasi, atau wawancara dari kehidupan nyata. Maka dari itu hasil dari penelitian kualitatif ini akan menjadi seperti laporan tertulis, karena didalamnya akan berbentuk flaksibel dan tidak terlalu terpaku dengan ketentuan yang bersifat baku dan juga struktur-struktur yang ada didalamnya tidak terpaku dengan satu arah saja.

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah Benazir Bhutto yang mana ia sebagai politikus pertama di Pakistan, sebab Pakistan yang masih menganut nilai-nilai patriarki yang mana posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, akan tetapi Benazir mampu menjadi politikus di Pakistan. Penelitian yang melibat Benazir Bhutto sebagai subjek ini akan meneliti pada masa kepemimpinan Benazir Bhutto pada periode pertama yaitu 1988 hingga 1990. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya tidak terlepas dari masa lalunya yang sangat keras, karena sejak kecil menyaksikan dunia politik yang sangat keras di Pakistan. Dunia politik yang keras mampu mengubahnya menjadi perempuan yang kuat. Benazir Bhutto juga

banyak mengeluarkan kebijakan untuk kesetaraan gender, agar perempuan di Pakistan dapat beraktivitas sama seperti laki-laki dan juga dapat mengurangi angka kekerasan pada perempuan.

1.8.3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder. Pengumpulan data secara sekunder yaitu berasal dari buku maupun dari internet yang informasinya relevan seperti jurnal, artikel, berita, laporan, majalah, literature dan juga website. Data-data yang disajikan juga bisa berupa catatan resmi dari pemerintah, dokumen dan juga dalam bentuk grafik (Hamdi, 2014, p. 49)

a. Studi Kepustakaan

Penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang menyangkut materi-materi yang akan diteliti dan setelah itu akan dijadikan perbandingan antara buku yang dijadikan sumber dengan penelitiannya, sehingga hal tersebut akan mengurangi kesamaan dalam penelitian.

b. Pengambilan data yang diambil di tempat yang bisa memberikan informasi terkait penelitian yang akan dianalisa.

1.8.4. Proses Penelitian

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif memerlukan data-data yang valid sehingga informasi yang telah diperoleh dapat diakui keabsahannya sebagai hasil dari penelitian. Analisis yang digunakan metode kualitatif ini berupa pengumpulan data sudah terkumpul, akan tetapi dari awal hingga akhir harus melakukan analisis terkait data-data yang sudah terkumpul. Hasil dari analisis yang dilakukan diawal akan menjadi penentu untuk analisa ke penelitian

selanjutnya. Menurut Moleong, dalam proses analisis data kualitatif dimulai dengan memeriksa seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, setelah itu menulis inti dari sumber tersebut sehingga dalam penulisan tidak akan terjadi banyak pengulangan kata. Dalam proses penelitian kualitatif akan banyak terjadi pemborosan dalam hal penulisan, sehingga dibutuhkan reduksi data (mengurangi) yang mana dapat dikategorikan sebagai penghematan dalam penulisan. Reduksi data sangat perlu sehingga dalam hasil penelitian, data-data yang telah terkumpul akan tertata rapi dan mudah dipahami (Siyoto & Sodik, 2015, p. 111).

BAB II

FAKTOR PENDORONG YANG MEMPENGARUHI BENAZIR BHUTTO MELAKUKAN PERUBAHAN POLITIK DI PAKISTAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, penulis akan berupaya melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam politik di Pakistan. Pertama, penulis akan membahas mengenai realitas partisipasi perempuan dalam politik di era sebelum Benazir Bhutto. Pada era sebelum Benazir terjun ke dunia politik, partisipasi perempuan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena Pakistan dikenal sebagai negara yang berlandaskan Islam, namun cara mereka dalam memandang Islam di sistem pemerintahannya dianggap salah. Sehingga hal tersebut mempengaruhi munculnya budaya patriarki di Pakistan.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi perempuan di Pakistan. Melihat dari rendahnya partisipasi perempuan dalam perpolitik di Pakistan, yang mana terjadi karena beberapa faktor misalnya dari faktor pendidikan. Perempuan di Pakistan masih kurang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, sebab budaya patriarki yang dianut di negara ini masih terlalu kuat. Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki ini juga lah berpengaruh terhadap dinamika perpolitikan di Pakistan, yang mana sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan dan juga terhadap partisipasi masyarakat dalam politik. Selain itu, isu-isu mengenai pembunuhan politik juga termasuk ke dalam salah satu isu yang mempengaruhi perpolitikan Pakistan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi perempuan, ternyata ikut mempengaruhi Benazir Bhutto sehingga pada masa pemerintahannya, Benazir membuat kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam politik Pakistan.

2.1. Realitas Partisipasi Perempuan Dalam Politik Era Sebelum Benazir

Bhutto

Sejak terbentuknya Pakistan sebagai negara, baik di tingkat provinsi dan nasional, perempuan mendapat kuota kursi yang sangat terbatas. Di awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1947 hingga tahun 1954, perempuan hanya memperoleh 3% kuota di kursi pemerintahan. Total kursi yang disediakan untuk perempuan adalah sebanyak 30 kursi, namun perempuan hanya memperoleh 2 kursi di pemerintahan. Dengan kondisi politik yang belum stabil, gubernur bertindak sebagai kepala negara, sehingga pada saat itu tidak disediakan kantor untuk Presiden. Hal tersebut menjadikan partisipasi perempuan belum dianggap menjadi isu yang penting di Pakistan. Tahun 1955 hingga tahun 1958, perempuan tidak mendapatkan kursi di pemerintahan. Kursi yang disediakan untuk perempuan adalah 80 kursi, namun perempuan tidak mendapatkan kesempatan tersebut karena budaya patriarki yang melekat di Pakistan. Dalam artian, pada periode ini, tercatat 0% partisipasi perempuan di kursi pemerintahan (Aftab, 2012). Tahun 1962 hingga tahun 1969, tercatat sebanyak 3,8% partisipasi perempuan dalam politik (PILDAT, 2004).

Pada tahun 1971, Zulfikar Ali Bhutto terpilih sebagai Presiden di Pakistan. Terpilihnya Zulfikar sebagai Presiden merupakan perubahan yang baik untuk perempuan. Tercatat sebanyak 5% partisipasi perempuan ke dalam kursi politik Pakistan (PILDAT, 2004). Hal ini dapat dilihat dari kebijakannya yang ingin melihat perempuan semakin percaya dan terdorong untuk lebih bisa mengeluarkan pendapatnya di depan umum. *Pakistan*

People's Party (PPP) adalah partai yang telah dibuat oleh Zulfikar Ali Bhutto, yang mana motto PPP akan memberikan peluang terhadap perempuan agar bisa lebih terdorong untuk menyuarakan hak-haknya yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah sebelumnya. Sehingga pada periode ini, untuk pertama kali perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu tanpa adanya tekanan dari banyak pihak. Sebab di periode sebelumnya, perempuan tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu, kecuali atas perintah dari suaminya (Mahmood, 1990, p. 805). Dengan kebijakan yang dikeluarkan Zulfikar memberikan langkah besar untuk perkembangan politik di Pakistan. Pada tahun 1971 hingga tahun 1977, perempuan diberikan kesempatan untuk bekerja di pemerintahan. Sekitar 10% dari kursi di Majelis Nasional serta 5% di Majelis Provinsi yang kuota tersebut diperuntukkan bagi perempuan (Nazaeia-i- Pakistan, t.t).

Pada kepemimpinannya, Zulfikar Ali Bhutto menginginkan agar partisipasi perempuan dan laki-laki di dalam perpolitikan Pakistan dapat seimbang. Dapat dilihat pada saat menteri hukum pada era Zulfikar yang memilih perempuan sebagai wakilnya dan hal itu mendapat persetujuan dari Zulfikar. Namun masyarakat menolak, dan hal ini menyebabkan kandidat wakil menteri hukum tersebut tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat Pakistan. Masyarakat Pakistan pada saat itu memandang bahwa perempuan belum siap dan mampu untuk memimpin di negaranya. Hal ini disebabkan karena perempuan belum pernah ikut terlibat dalam perpolitikan Pakistan sehingga masyarakatnya belum bisa memilih perempuan sebagai pemimpin. Berbeda dengan pemikiran masyarakatnya, Zulfikar memandang dengan

adanya partisipasi perempuan di dalam politik Pakistan, dapat membuktikan bahwa perempuan juga memiliki pemikiran yang akan menjadikan negaranya menjadi lebih baik (Shaheed & Mumtaz, 1987, p. 118). Hal tersebut dapat memotivasi perempuan yang lainnya agar bisa ikut berpartisipasi ke dalam perpolitikan Pakistan dan juga dapat mengubah pemikiran masyarakat Pakistan yang masih menganut budaya patriarki.

Setelah kepemimpinan Zulfikar Ali Bhutto, Zia Ul-Haq menggantikannya sebagai Presiden Pakistan. Selain dengan latar belakang militer, Zia juga dipandang sebagai pemimpin yang agamawan. Islam yang dipahami oleh Zia juga membentuknya untuk membuat kebijakan untuk mengislamisasikan Pakistan pada masa jabatannya. Zia berhasil mengubah kebijakan sebelumnya, yang mana perempuan diberikan kebebasan untuk bisa berpartisipasi dalam politik, namun di periodenya aktivitas perempuan kembali dibatasi. Islamisasi yang dikenalkan oleh Zia ini ingin melanggengkan budaya patriarki yang sebelumnya sangat kental di Pakistan, yang mana membuat partisipasi perempuan di dalam politik semakin tidak terlihat. Kondisi ini juga didukung oleh kebijakan kontroversial Zia yang justru mendiskriminasi perempuan, yaitu hukum *hudoood*. Kebijakan tersebut menyebabkan posisi perempuan menjadi semakin terbatas, sehingga hal ini menjadi hambatan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Kebijakan hukum *hudoood* Zia akan dibahas pada bab selanjutnya.

2.2.Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Rendahnya Partisipasi Perempuan Era Sebelum Benazir Bhutto

Negara dapat dikatakan demokrasi jika perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dan aktif dalam pengambilan keputusan politik di negaranya. Pentingnya perempuan dan laki-laki untuk ikut serta dalam kegiatan pengambilan keputusan suatu negara adalah salah satu dari hak asasi seorang warga negara terhadap pembangunan negaranya untuk menjadi lebih maju. Mematuhi dasar dari hak asasi manusia bukanlah satu-satunya alasan bahwa perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam politik. Sebab, pencapaian demokrasi suatu negara harus memerlukan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Serta dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan, sehingga antara perempuan dan laki-laki dapat menumbuhkan kesatuan dan menyatukan perbedaan. Negara dapat dikatakan demokrasi jika sudah bisa menyatukan perbedaan yang ada di negaranya (Bibler, Mohan, & Ryan, 2014, p. 5).

Keikutsertaan perempuan dalam proses politik bukanlah suatu hal yang harus dicapai. Namun dengan ikut sertanya perempuan dalam partisipasi politik dapat memberikan kesempatan terhadap perempuan untuk menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dan dapat membangun masyarakat yang demokratis, makmur dan inklusif. Sehingga jika suatu tingkat partisipasi antara perempuan dan laki-laki yang tidak setara, dianggap gagal untuk menerapkan negara yang demokrasi. Sama halnya yang terjadi di Pakistan, yang mana negara belum mampu untuk menyetarakan partisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam perpolitikannya (Lewis, 2011, p. 7). Beberapa

faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik Pakistan akan dibahas di bawah ini.

2.2.1 Sejarah Diskriminasi di Pakistan

Sejak berdirinya Pakistan sebagai negara Islam pada tahun 1947, Islam dijadikan sebagai identitas dari negara tersebut. Pemimpin sipil dan militer menggunakan Islam sebagai alat untuk menggunakan kekuasaannya dalam membuat kebijakan negara. Dengan kata lain bahwa peran agama dijadikan sebagai hal yang utama dalam menjalankan sebuah perpolitikan dan kehidupan bermasyarakat di Pakistan. Pada tahun 1980, Pakistan juga ikut terlibat dalam memberikan bantuan senjata terhadap mujahidin dengan tujuan untuk melawan uni soviet. Sejak saat itu Islam di Pakistan semakin radikal karena tentara Pakistan juga ikut dalam memberikan dukungan untuk kelompok-kelompok militan di Pakistan. Kelompok-kelompok jihad semakin bermunculan sejak saat itu dan menjadikan Pakistan sebagai pusat dari gerakan-gerakan Islam radikal, sehingga menjadikan kondisi Pakistan semakin tidak aman. Kondisi tidak aman tersebut berimbas hingga ke kondisi politiknya yang menjadi tidak stabil. Keikutsertaan militer dalam segala kebijakan negaranya, semakin memperkeruh kondisi Pakistan (Bajoria, 2011).

Kondisi Islam yang semakin radikal di Pakistan, serta segala bentuk kebijakannya harus berdasarkan ajaran Islam. Pemerintah juga ikut berusaha dalam mengislamisasikan Pakistan. Proses Islamisasi Pakistan mulai didukung penuh masyarakat Pakistan ketika Zia Ul-

Haq berhasil menjadi Presiden Pakistan. Zia yang juga memiliki background militer dikatakan sempurna menjadi pemimpin pada saat itu dengan membawa Islam sebagai kiblat dari kebijakannya, sehingga Zia memperoleh dukungan penuh oleh masyarakat dan sebagian ulama-ulama Pakistan. Proses pengislaman Zia ini mencakup pada pengenalan hukum-hukum Islam, mendirikan pengadilan federal syariah, mendirikan sekolah-sekolah Islam (madrasah). Zia juga berusaha memasukkan Islam dalam proses pembelajaran dalam pelatihan militer. Namun dari beberapa kebijakan Islamisasi Zia ini rupanya tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Pakistan, terutama untuk perempuan. Zia mengeluarkan aturan melalui undang-undang yang mengatur pelanggaran seksual, namun hal ini malah menambah angka diskriminasi terhadap perempuan (Bajoria, 2011).

Kebijakan yang mencoba untuk mengislamisasikan Pakistan ini sangat erat kaitannya dengan sistem patriarki, yang mana kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal inilah yang diaplikasikan Zia di Pakistan. Laki-laki memiliki banyak kesempatan dalam melakukan aktivitasnya seperti bersekolah, berpakaian, bekerja dan aktivitas lainnya di luar rumah. Namun hal tersebut tidak bisa dirasakan oleh perempuan di Pakistan, banyak yang tidak bisa merasakan bangku sekolah, cara berpakaian sangat diatur, dan juga mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki sangat

terlihat jelas di Negara ini. Perempuan tidak bisa melakukan hal-hal yang laki-laki bisa lakukan, serta banyak perempuan yang harus berhenti bersekolah karena larangan untuk melakukan aktivitas di luar rumah (Ahmed, 1985, p. 4). Adapun kebijakan Zia yang semakin mendiskriminasi posisi perempuan ialah dengan diterapkannya hukum *hudood*.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, Hukum *hudood* adalah salah satu bentuk hukuman dari beberapa jenis hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya. Islam melarang umatnya untuk menyakiti seseorang, kecuali dengan cara yang benar. Kebenaran tersebut harus disertai dengan bukti yang cukup. Jika bukti tersebut diragukan, maka hal tersebut tidak bisa menjadi dasar bagi penegakkan hukum (Thohari, 2018, p. 55). Jika dilihat dari sudut pandang pembuktian, pembuktian zina dilakukan dengan kesaksian empat saksi laki-laki muslim waras. Lalu hal lainnya bisa dibuktikan dengan kehamilan dan kelahiran anak dari seorang perempuan yang terbukti belum menikah. Akan tetapi, jika ada bukti-bukti tersebut yang tidak bisa dibuktikan, dapat dilihat kembali dari syarat-syarat pembuktian *hudood*. Maka pelaku kejahatan tersebut tetap dapat dihukum oleh pengadilan, dengan dijatuhi hukuman *non-hudood* yang dikenal dengan sebutan hukuman *ta'zir*, yang mana bentuk hukumannya diserahkan kepada kewenangan hakim (Amal & Panggabean, 2004, p. 162).

Berbeda dengan pandangan Zia terhadap Hukum *hudood* yang mana dalam hukum tersebut ditetapkan untuk hukuman seseorang yang telah melakukan zina. Namun pada masa pemerintahannya, Zia salah dalam menerapkan hukum *hudood* ke masyarakat Pakistan. Dalam penerapannya, hukum *hudood* dianggap tidak benar-benar melindungi perempuan, sebab jika seorang perempuan yang menjadi korban dari perzinaan tidak bisa dikatakan sebagai korban jika tidak bisa membawa 4 saksi laki-laki. Berikut adalah tabel perbedaan hukum *hudood* menurut Islam dan yang dilakukan oleh Zia :

Hudood Menurut Islam	Hudood Menurut Zia Ul-haq
<ul style="list-style-type: none"> • Berasal dari Ilmu Fiqih Islam • Memberikan efek jera terhadap pelaku. • Harus menghadirkan empat orang saksi laki-laki muslim yang waras. • Atau dibuktikan dengan kehamilan/kelahiran dari seorang perempuan yang belum menikah • Jika bukti-buktinya tidak bisa dibuktikan, maka mencari bukti yang lain. • Khusus kejahatan zina, untuk melindungi perempuan dari tindak kejahatan zina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diadopsi dari Ilmu Fiqih Islam. • Memberikan efek jera terhadap pelaku. • Harus menghadirkan 4 orang saksi laki-laki muslim. • Jika syarat pembuktiannya tidak bisa dibuktikan, maka perempuan yang menjadi korban zina akan diadili dan mendapatkan hukuman. • Meningkatkan angka diskriminasi terhadap perempuan.

Tabel 2.2.1 Perbedaan hukum *hudood* menurut Islam dan menurut Zia Ul-Haq

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hukum *hudood* menurut Islam dan hukum *hudood* menurut Zia berbeda dalam penerapannya. Akibatnya dengan adanya hukum *hudood* ini malah menjadikan perempuan semakin terpojokkan (Zadi & Awan, 2016, p. 24). Status dan kedudukan perempuan mulai menjadi hal yang

mengkhawatirkan di antara kelompok-kelompok perempuan, masyarakat sipil dan juga media. Perdebatan yang serius mengenai isu-isu perempuan, kesetaraan *gender* dan diskriminasi, muncul karena kebijakan Zia yang tidak merujuk terhadap perlindungan kepada perempuan di Pakistan. Rezim militer dijadikan sebagai sistem politik yang berbeda karena berlabelkan *Nizam-i Mustafa/Nizam-i-Islam* (sistem yang berasal dari Nabi Muhammad/ sistem Islam). Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan usaha Zia untuk mengubah sistem hukum di Pakistan, sebagai identitas negara Islam. Zia merasa bahwa ia telah dikirim Tuhan untuk menjadikan Negara Pakistan sebagai negara Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan memiliki kewajiban untuk membangun moral masyarakatnya agar lebih Islami (Arif, 1995, p. 251).

Pemahaman Islam yang dipahami oleh masyarakat dan pemerintah Pakistan ini dianggap tidak sepenuhnya sama persis dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Islam adalah agama yang cinta damai. Muhammad Ali Jinnah yang pada saat memiliki keinginan agar Pakistan menjadi negara Islam sehingga dapat terciptanya perdamaian, namun kenginannya tersebut tidak mudah untuk diaplikasikan di Pakistan. Setelah Muhammad Ali Jinnah meninggal, proses Islamisasi semakin berubah dan menjadi lebih keras. Namun pemahaman oleh sebagian masyarakat Pakistan terhadap nilai Islam yang diaplikasikan di negaranya tersebut tidak sesuai. Pemerintah menjadikan pasukan militer untuk mengawasi setiap masyarakat yang

dianggap melanggar syariat Islam (Malaika, 2014). Oleh karenanya, hal tersebut menjadikan Pakistan sebagai negara yang tidak aman dan tentram. Sehingga sejak saat itu perang sering terjadi di Pakistan. Kesalahpahaman masyarakat Pakistan terhadap Islam juga menjadikan Pakistan sebagai negara yang menganut budaya patriarki, yang mana hal ini semakin memberikan batas untuk perempuan dalam mengeluarkan hak-haknya.

2.2.2. Budaya Patriarki di Pakistan

Pakistan adalah negara yang menganut budaya patriarki. Nilai-nilai patriarki yang sudah tertanam ke dalam budaya Pakistan, menjadikan alat untuk membatasi ruang gerak perempuan. Perlakuan antara perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Adanya budaya patriarki di Pakistan, membuat angka diskriminasi terhadap perempuan terus meningkat. Budaya patriarki erat kaitannya dengan kekerasan. Sebab perempuan di Pakistan diwajibkan untuk mematuhi segala larangan terhadap hal-hal yang telah diperintahkan namun jika dilanggar, mereka akan mendapatkan sanksi. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa kekerasan *gender* adalah bagian dari budaya patriarki.

Perempuan di Pakistan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak bersama muhrimnya (ayah, saudara laki-laki atau suami). Cara mereka dalam berpakaian juga sangat diatur, sehingga kebebasan dalam berpakaianpun sangat terbatas. Dalam bidang olahraga, perempuan tidak diperbolehkan mengikuti

olahraga apapun yang bersifat di luar lapangan. Sehingga pada saat itu, perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mewakili negaranya untuk perlombaan olahraga. Melihat hal tersebut dalam kegiatan sehari-haripun, aktivitas perempuan sangat dibatasi (Sabir, 2018).

Peran antara perempuan dan laki-laki di Pakistan dipengaruhi oleh tradisi budaya dan agama, yang mana sering disalahartikan oleh pemerintahannya. Akibatnya hal tersebut membatasi kebebasan perempuan dan juga kebebasan dalam menggunakan hak pilih ataupun ikut serta dalam membuat kebijakan Negara. Tradisi budaya inilah yang dapat mengakibatkan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih rendah sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap rendahnya kesadaran dalam hal politik. Tradisi budaya juga dapat mempengaruhi perempuan untuk bangkit dalam mendapatkan posisi di perpolitikan sehingga dengan cara tersebut dapat menyalurkan hak-hak perempuan. Alhasil, sifat kompetitif yang dimiliki perempuan dalam dunia politik, tidak memberikan keuntungan bagi Pakistan. Serta hal tersebut dapat membatasi masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap perempuan yang ingin mencalonkan diri atau berpartisipasi di jabatan politik (Bibler, Mohan, & Ryan, 2014).

Perempuan dianggap memiliki status yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik dalam aspek kehidupan sosialnya maupun politik. Hal itu dapat dilihat dari banyak perempuan di Pakistan yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak, sehingga beberapa dari mereka memilih untuk putus sekolah atau bahkan tidak bersekolah.

Perempuan di Pakistan sangat jauh tertinggal dalam bidang pendidikan dan hal tersebut juga berdampak ke dalam dunia kerja. Bagi sebagian perempuan di Pakistan, mereka tidak bisa merasakan bangku sekolah selayaknya laki-laki (Awan S. Z., 2016, p. 210). Namun jika mereka berasal dari keluarga yang memiliki perekonomian yang bagus, mereka akan disekolahkan ke luar negeri.

Pendaftaran	1977-1988			
	1976-1977		1987-1988	
	Male	Female	Male	Female
Sekolah Dasar	65,7%	34,2%	62,8%	37,1%
Sekolah Menengah Pertama	70,6%	29,3%	63,4%	36,5%
Sekolah Menengah Atas	69,8%	30,1%	67,7%	32,2%
Perguruan Tinggi	69,6%	30,3%	67,5%	32,4%

Tabel 2.2.2 Persentasi partisipasi perempuan dalam pendidikan era sebelum Benazir Bhutto (*Journal of International Women's Studies*, 2016).

Berdasarkan table di atas, tingkat pendidikan perempuan dari tahun 1977 hingga tahun 1988 memang menunjukkan peningkatan, akan tetapi laki-laki lebih mendominasi dan angka perempuan lebih rendah. Budaya patriarki ini menyebabkan peluang perempuan untuk

memperoleh pendidikan sangat terbatas, yang mana rendahnya tingkat pendidikan inilah yang menjadi faktor rendahnya partisipasi perempuan Pakistan untuk terlibat dalam politik. Mereka dianggap memiliki pengetahuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pendidikan adalah jendela dunia, yang mana dengan pendidikan orang-orang dapat berpikir lebih terbuka. Dalam artian ialah jika perempuan memiliki pendidikan yang bagus, maka akan mempengaruhi cara berpikirnya. Perempuan yang berpendidikan lebih tahu akan hak-haknya serta mereka akan memberikan partisipasi yang lebih besar dalam bidang politik. Sehingga dengan hal tersebut, dapat mengubah Pakistan ke arah yang lebih baik di masa depan (Khan, 2014).

Sama halnya dengan politik, hak perempuan untuk ikut serta dalam proses politik harus setara dengan hak laki-laki, yang mana hal tersebut termasuk dalam hak asasi dasar. Hak-hak tersebut diakui dalam hukum regional maupun internasional, deklarasi hak asasi manusia, *Internasional Covenant on Civil and Politics Rights* (ICCPR), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan (UNSC 1325), dan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (CPRD). Sebagaimana yang tertera di dalam Deklarasi Universal HAM (1948) dan *Internasional Covenant on Civil and Politics Rights* (ICCPR) (Baehr, 1995, p. 141) sebagai berikut:

Deklarasi Universal HAM (1948)

Pasal 21

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- 3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Internasional Covenant on Civil and Politics Rights (1966)

Pasal 25

Setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa adanya pembedaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk:

- 1) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- 2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan para pemilih;
- 3) Memiliki akses, dalam ketentuan kesetaraan yang diakui secara umum, ke layanan public di negaranya.

Berdasarkan penjelasan pasal 21 dan pasal 25 di atas, setiap warga negara baik perempuan dan laki-laki harus memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik. Namun berbeda dengan perempuan di Pakistan, yang mana keikutsertaan mereka di perpolitikan masih sangat kurang, bahkan mereka juga dibatasi dalam ikut serta dalam proses pemilu (Wardah, 2017). Oleh sebab itu, perempuan tidak dapat menyuarakan hak-haknya sebagaimana yang laki-laki lakukan.

2.2.3. Pembunuhan Politik

Selain budaya patriarki di atas, hal lain yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ialah pembunuhan politik. Pembunuhan politik sudah bukan menjadi hal baru lagi di

Pakistan, sebab pembunuhan politik kerap terjadi apabila seorang politikus hendak diturunkan dari kursi pemerintahan. Hal tersebut juga terjadi pada masa pemerintahannya, Zia Ul-Haq menjatuhkan hukuman gantung terhadap kepada Bapak Benazir Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto adalah mantan Presiden dan juga mantan Perdana Menteri di Pakistan sebelum masa pemerintahan Zia. Akan tetapi Zulfikar diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri atas tuduhan korupsi, nepotisme, dan juga mencoba untuk memodernisasikan pemerintahan Pakistan. Namun selama masa tahanannya, Zulfikar kerap mendapatkan ketidakadilan pada saat di persidangan. Selama masa tahanannya, tuduhan-tuduhan terhadap Zulfikar semakin bertambah. Hingga pada akhirnya pada tahun 1979, Zulfikar dijatuhkan hukuman gantung atas tuduhan ikut terlibat dalam pembunuhan lawan politiknya (Syarifudin, 2007).

Pembunuhan politik menjadi momok yang menakutkan di Pakistan, yang mana hal tersebut membuat citra politik di Pakistan sangat buruk. Serta pada masa pemerintahan Zia, pasukan militer menjadi pendukung dari setiap kebijakannya. Hingga di masa pemerintahannya dikenal sebagai masa yang otoriter, karena pasukan militer akan melaksanakan perintah untuk mengeksekusi orang-orang yang dianggap melanggar kebijakan Zia. Setiap masyarakat Pakistan diperintahkan untuk tunduk akan segala perintah Zia, namun hal itu yang banyak menimbulkan diskriminasi di Pakistan (Shah, 1997, p. 60).

Alasan pembunuhan pada Zulfikar Ali Bhutto diketahui karena adanya perbedaan pemikiran antara Zulfikar dan Zia. Dalam kebijakan Zulfikar, perempuan dan laki-laki bisa melakukan aktivitas yang sama, yang mana dalam artian ingin memodernisasikan Pakistan. Pada saat menjabat sebagai Presiden dan Perdana Menteri di Pakistan pada periode 1971 hingga 1978, Zulfikar berusaha agar perempuan dapat menyalurkan hak-haknya dan ingin melihat adanya kesetaraan gender. Namun pemikirannya tersebut sangat bertentangan pada pemikiran Zia yang ingin mengislamisasikan Pakistan. Zia yang pada saat itu masih menjabat sebagai pimpinan pasukan militer di Pakistan, selalu mengawasi setiap kebijakan Zulfikar. Hingga pada tahun 1977, Zia berhasil terpilih sebagai Presiden Pakistan dan Zulfikar pada saat itu masih menjadi perdana menteri (I.A.Rehman, 2017). Namun setelah terpilih sebagai Presiden, Zia berhasil mengkuadeta Zulfikar hingga pada akhirnya Zulfikar dipenjara atas perintah Zia.

Zulfikar menjalankan masa tahanannya dan dijatuhkan hukuman gantung. Mendengar dakwaan tersebut membuat Benazir Bhutto sangat terpukul, sebab Benazir percaya bahwa semua tuduhan yang dijatuhkan terhadap bapaknya itu tidak benar. Benazir meyakini bahwa tertangkapnya Zulfikar tidak terlepas dari lawan-lawan politiknya yang ingin menjatuhkan Zulfikar, yang mana termasuk diantaranya Zia Ul-Haq (Chengappa, 2004). Benazir melihat aktor dibalik tertangkapnya Zulfikar ialah Zia, karena Benazir menganggap keduanya memiliki kebijakan dan pemikiran yang sangat berbeda.

Selama masa tahanan bapaknya, Benazir Bhutto berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti agar bapaknya bisa dibebaskan. Salah satu diantaranya, Benazir mengumpulkan rekan-rekan kerja Zulfikar yang mana sangat mendukung setiap kebijakan Zulfikar ini untuk menjadi saksi terhadap setiap tuduhan bapaknya. Namun usaha Benazir tersebut tidak bisa terlaksana karena dipersulit oleh beberapa pihak kejaksaan, hingga pada tahun 1979 Zulfikar dihukum gantung (Munoz, 2014, p. 18). Kematian Zulfikar membuat Benazir beserta ibu dan saudara-saudaranya sangat terpukul. Sebab di mata keluarganya, Zulfikar dikenal sebagai ayah yang memiliki kepribadian yang sangat baik, sehingga menurut mereka tuduhan-tuduhan terhadap Zulfikar dianggap tidak benar.

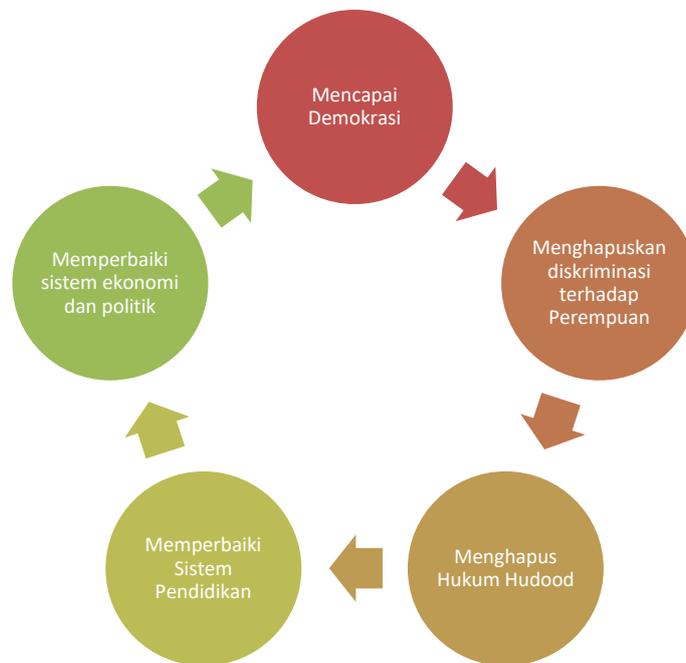
Kedekatan antara Zulfikar dan Benazir inilah yang memotivasi Benazir untuk terjun ke dunia politik. Hukum gantung yang terjadi pada Zulfikar sebagai cambuk bagi dirinya untuk bisa mengembalikan citra keluarganya. Ketidakadilan yang selalu dirasakan Benazir menjadikannya sebagai sosok perempuan yang tangguh dan berani. Benazir dikenal sebagai perempuan yang berani dalam melawan suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan pemikirannya (Zakaria, 1989). Hal tersebut dikarenakan ia ingin mengembalikan nama baik dari Zulfikar Ali Bhutto.

Di atas telah dijelaskan mengenai partisipasi perempuan dalam politik di Pakistan era sebelum Benazir Bhutto. Hal tersebut didukung oleh realitas partisipasi perempuan dalam politik di Pakistan era

sebelum Benazir Bhutto, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik di Pakistan. Yang mana pembunuhan politik dan budaya patriarki adalah yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi perempuan dalam perpolitikan Pakistan.

Berdasarkan temuan penulis dalam proses penulisan skripsi ini, penulis merumuskan adanya lingkaran emansipasi gender di dalam kebijakan Benazir. Berikut adalah lingkaran emansipasi gender oleh Benazir Bhutto:

Gambar 2.2.3 Lingkaran emansipasi gender dalam kebijakan Benazir Bhutto



Lingkaran emansipasi gender di dalam kebijakan Benazir ini saling berkaitan satu dan lainnya. Sehingga dengan terwujudnya kebijakan Benazir sama halnya dengan mencapai nilai-nilai demokrasi yang di era sebelum Benazir sulit untuk diwujudkan. Untuk itu pada bab selanjutnya akan menganalisis proses *empowerment* yang

dijalankan Benazir di Pakistan melalui pendekatan *women empowerment* oleh Rawlands. Melalui pendekatan ini akan melahirkan kekuatan-kekuatan baru di dalam sistem pemerintahan Pakistan, sehingga dapat membentuk Pakistan menjadi negara yang demokrasi.

BAB III
**ANALISIS *WOMEN EMPOWERMENT* DALAM UPAYA BENAZIR
BHUTTO UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM POLITIK PAKISTAN 1988-1990**

Pada bab ini penulis akan menganalisis upaya Benazir Bhutto dalam meningkatkan partisipasi perempuan ke dalam perpolitikan Pakistan dengan menggunakan konsep *women empowerment* oleh Rawlands. Konsep ini akan melihat bagaimana proses Benazir dalam meningkatkan kesadaran perempuan-perempuan untuk mengubah sistem di Pakistan. Sehingga dengan terpilihnya Benazir sebagai politikus perempuan pertama di Pakistan, mampu membawa perubahan terhadap kondisi perpolitikan sebelumnya.

Jika dilihat dari konsep *women empowerment* ini, keterlibatan Benazir ke perpolitikan Pakistan bisa dilihat dari 3 dimensi yang ada di konsep ini yaitu *personal empowerment*, *rational empowerment*, serta *collective empowerment*. Berdasarkan dimensi-dimensi yang ada di konsep ini, akan melihat bagaimana proses Benazir untuk mengubah sistem di Pakistan sehingga berdampak kepada meningkatnya angka partisipasi perempuan di dalam politik.

1.1. Personal Empowerment

Personal Empowerment ini akan melihat bagaimana proses Benazir Bhutto dalam meningkatkan kapasitas yang ada di dalam dirinya, sehingga mampu membawa perubahan terhadap sistem di Pakistan. Kemampuan dalam diri Benazir berasal dari latar belakangnya yang mana bisa dilihat dari latar belakang pendidikannya. Dari pendidikan yang Benazir dapatkan inilah yang membentuk pemikiran baru Benazir sehingga menjadi pribadi yang memiliki kapasitas dan

membuatnya percaya diri untuk mampu memperjuangkan hak-hak perempuan di Pakistan. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

1.1.1. Latar Belakang dan Pembentukan Pemikiran Benazir Bhutto

Masa kecil Benazir bisa dikatakan sangat beruntung dari anak-anak perempuan yang ada di Pakistan. Sebab, Benazir mampu bersekolah di lingkungan Pakistan yang pada saat itu masih sangat minim untuk anak perempuan bisa merasakan bangku sekolah. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Pakistan, Benazir lalu melanjutkan sekolahnya ke Amerika Serikat. Di sana, Benazir disekolahkan di *Radcliffe Harvard* jurusan Ilmu politik. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Amerika Serikat, Benazir melanjutkan pendidikannya di *Oxford University* dengan jurusan Filsafat, Politik dan Ilmu ekonomi (Cash, 1996) . Pengalaman bersekolahnya di Amerika Serikat dan Inggris, mengubah cara berpikir Benazir yang lebih demokrat. Benazir mulai memiliki cara pandang yang lebih luas, bahkan menungkan pemikiran-pemikirannya dalam sebuah tulisan. Salah satu karyanya yang banyak menuai pujian ialah *Reconciliation Islam, Democracy, and the West*. Tulisan ini berisi kritik dan pemikiran Benazir terhadap kondisi Pakistan. Melalui tulisan tersebut, Benazir juga mengungkapkan bahwa Pakistan harus lebih terbuka dan bisa menjadikan Pakistan sebagai negara yang demokrasi.

Benazir memandang bahwa pemerintah salah dalam mengaplikasikan Islam ke dalam budaya dan politik di Pakistan, sehingga Pakistan terbentuk menjadi negara yang tidak demokrasi. Sementara menurut Benazir, Islam dan demokrasi itu bisa berjalan beriringan sebab

Islam telah memberikan referensi yang jelas terhadap manusia untuk menjadi Khalifah di dunia ini, sebagaimana yang telah dikatakan di Al-Qur'an. Hal inilah menjadikan landasan kuat politik menurut Benazir, yang mana memerintahkan kepada umat manusia untuk mematuhi pemimpinnya. Sama halnya dalam pemerintahan yang demokratis, sebab pemerintahan yang demokrasi adalah bagian dari sistem yang ada di Islam yang menjadi bukti kesalahan dari mitos bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa beriringan. Benazir menyatakan bahwa dalam ajaran Islam, pemerintah dan rakyatnya semestinya harus saling melakukan musyawarah atau adanya hubungan timbal balik dengan tujuan persoalan-persoalan bisa sama-sama ditanggulangi (Bhutto, 2008, pp. 79-81).

Pandangan dan pemikiran Benazir dalam memandang rekonsiliasi Islam dan demokrasi ini terlihat jelas bahwa Benazir dalam setiap kebijakannya selalu dikaitkan dengan Al-Qur'an. Meskipun demikian, Benazir tidak pernah menyatakan Islam dan negara secara terang-terangan kepada di depan masyarakat Pakistan. Pemikiran Benazir termasuk ke dalam corak pemikiran yang menekankan bahwa pentingnya perwujudan dari inti atau makna dari aspek formalisasi serta tekstual keberagaman. Dalam arti lainnya ialah Benazir tertuju dalam pemahamannya terhadap kitab suci Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an tidak dipandang semata-mata hanya dalam bentuk teks saja (Santoso, 2016).

Melihat perkembangan relasi Islam dan demokrasi menjadikan Benazir berusaha untuk mengupayakan rekonsiliasi yang sesungguhnya, yang mana hal ini juga telah dirintis oleh tokoh-tokoh Islam terdahulu di

seluruh belahan dunia. Hal ini disebabkan karena Barat selalu memandang Islam sebagai suatu ancaman ketika dikaitkan dengan kekerasan dan ekstrimisme agama. Selain itu banyak yang kontra yang bermunculan mengenai Islam dan demokrasi yang mana menyangkut mengenai hak asasi manusia, peran perempuan di masyarakat, menghargai agama dan budaya lain, modernitas dan teknologi. Benazir menginginkan agar kontra-kontra mengenai Islam akan bisa terhapuskan, sehingga Islam dan barat bisa menyatu tanpa adanya ancaman dan kekerasan dengan upaya rekonsiliasi tersebut (Sukardi, 2010).

Di zaman yang modern ini, banyak yang memandang salah bahwa Islam dan politik kerap dilambangkan sebagai kafir ataupun musyrik. Sehingga orang-orang yang memandang tersebut banyak memerangi orang-orang muslim yang berpolitik, mereka ialah kaum ekstremis. Berakar dari hal itulah yang menimbulkan polemic yang berkepanjangan. Benazir yang memandang hal tersebut salah, di dalam bukunya ia menjelaskan:

“Islam is committed not only to tolerance and equality but to the principles of democracy. It is a religion built upon the democratic principles of consultation (shura), building consensus (ijma), finally leading to independent judgement (ijtihad)” (Bhutto, 2008, p. 20)

Pernyataan Benazir di atas membuat banyak ahli sependapat dengannya bahwa, Islam sebagai agama mengandung lebih banyak unsur demokratis, pluralism dan keadilan, dibandingkan dengan agama-agama lain. Konsep terhadap kebebasan dalam berpikir juga berlaku dalam kebebasan dalam memilih sistem politik dan bentuk pemerintahannya.

Masyarakat seharusnya lebih dibebaskan dalam proses perpolitikan, sebab hal tersebut sudah menjadi haknya sebagai warga negara.

Benazir dikenal sebagai tokoh politik muslim yang menempatkan agama sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari berdirinya sebuah negara. Benazir memandang bahwa berdirinya sebuah negara juga tidak dapat dipisahkan dari partisipasi perempuan dalam proses membangun demokrasi di negara tersebut. Ada dua hal yang melatarbelakangi munculnya pemikiran benazir sebagai politikus perempuan di Pakistan. *Pertama*, adanya teori yang mengatakan bahwa Islam merupakan suatu ideologi atau dasar berdirinya suatu negara. *Kedua*, perempuan dianggap memiliki hak yang besar untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Sirait, 2013).

Benazir yang dikenal agamawan juga memiliki keinginan agar nilai yang diperolehnya dari barat bisa diaplikasikan di negaranya, yaitu nilai demokrasi. Hal lain yang ingin Benazir ubah dari barat ialah pandangan barat terhadap Islam. Barat memandang bahwa Islam adalah agama yang keras dan bisa melahirkan bibit terorisme. Hal lain yang menguatkan pemikiran barat tersebut ialah melihat adanya kelompok Taliban yang berasal dari Pakistan yang mana dikenal sebagai negara Islam. Benazir sangat menginginkan agar keduanya bisa saling bertoleransi tanpa ada sekat, sehingga dikemudian hari negara Islam dan barat bisa membangun kerjasama yang baik (Esposito & Voll, 1996, p. 23).

Pemikiran Benazir di atas inilah yang mampu mengembangkan dirinya sehingga menjadikannya sebagai pribadi yang memiliki kapasitas. Dengan memiliki kapasitas inilah yang membangkitkan Benazir untuk memberikan kekuatan bagi perempuan-perempuan yang selama ini banyak menerima tekanan di Pakistan. Secara perlahan Benazir mulai menuangkan pemikiran-pemikirannya untuk memberikan kekuatan terhadap perempuan-perempuan lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam keikutsertaannya di PPP, yang mana Benazir juga mampu melanjutkan kembali kebijakan dari ayahnya. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

1.2.Rational Empowerment

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang dari pembentukan pemikiran Benazir, hal inilah yang membuatnya berinisiatif dalam membuat perubahan untuk perempuan-perempuan Pakistan. Maka dari itu, untuk menindak lanjuti inisiatif tersebut, Benazir kemudian ikut berpartisipasi ke dalam PPP. Melalui keikutsertaannya di PPP, Benazir mulai membangun pengaruhnya sehingga pemikiran-pemikirannya bisa mendapatkan dukungan yang lebih banyak.

Sebagai langkah awal setelah kematian ayahnya, Benazir menggantikan posisi ayahnya sebagai pimpinan PPP yang merupakan partai yang didirikan ayahnya sendiri, Zulfikar Ali Bhutto pada 30 November 1967. Partai ini memiliki asas Islam dan visi politik yang menganut demokrasi dan misi ekonomi yang bersifat sosialisme, serta mengedepankan kedaulatan untuk rakyatnya (PPP, 2016). Pemilihannya sebagai pimpinan PPP, membuat Benazir bisa memberikan

pengaruh untuk membangkitkan semangat dalam menentang rezim Zia Ul-Haq yang semakin keras terhadap warganya. Benazir yang memiliki wibawa dan sebagai pewaris nama besar serta kharisma yang dimiliki ayahnya, cukup berhasil dalam menarik perhatian masyarakat Pakistan. Begitu besarnya antusias masyarakat pendukung Benazir serta diamnya pemerintahan sebelumnya terhadap kritikan Benazir ini menjadikan peluang besar bagi Benazir dalam mewujudkan cita-cita politiknya (Ali, 2008, p. 47).

Menjadi pimpinan PPP, Benazir mencoba membangkitkan kembali kejayaan partai tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan Benazir juga berkiblatkan dari visi PPP, yang mana mengedepankan kedaulatan rakyatnya serta menjunjung tinggi nilai demokrasi. Benazir dan ayahnya memang memiliki kesamaan pemikiran dalam berpolitik, sehingga mudah bagi Benazir untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ayahnya (Fremson, 2016). Menegakkan demokrasi di Pakistan tidak mudah, terlebih Pakistan yang terkenal dengan budaya patriarkinya. Benazir terus berjuang untuk memastikan agar tercapainya kesetaraan di Pakistan, sehingga dapat membentuk Pakistan menjadi negara yang menegakkan keadilan serta tercapainya demokrasi (PPP, 2016).

Dengan terbentuknya pemikiran-pemikiran yang disalurkan Benazir ke dalam partainya, membuatnya dapat memberikan pengaruh terhadap anggota-anggota partainya. Anggota-anggota dari PPP ini juga sangat mendukung akan pemikiran Benazir, sebab mereka memiliki tujuan yang sama dalam membentuk negara yang demokrasi di Pakistan. Sehingga mereka jugalah yang membantu Benazir dalam pembentukan kebijakan-kebijakannya untuk mengubah sistem di Pakistan (PPP, 2016). Dampaknya, pemikiran-pemikiran Benazir ini akan

mendapatkan banyak dukungan dari pihak-pihak yang ingin melihat adanya perubahan. Sehingga dengan hal inilah yang membentuk Benazir mulai membentuk kebijakan, dengan tujuan dapat mengubah Pakistan menjadi negara yang demokrasi.

Benazir Bhutto akhirnya berhasil memenangkan pemilihan umum dan menjadikannya sebagai politikus perempuan pertama yang terpilih secara demokratis untuk memimpin sebuah negara Islam. Hal ini dikarenakan para pendukung Benazir yang berasal dari dalam PPP dan masyarakat Pakistan, ingin melihat negaranya dapat menjalankan nilai-nilai demokrasi di negaranya.

1.3. Collective Empowerment

Collective empowerment adalah tindakan yang kolektif yang berbasis kerjasama sehingga dapat terlibat dalam struktur politik. Hal ini akan melihat bagaimana proses Benazir Bhutto setelah menjadi Perdana Menteri di Pakistan, sehingga Benazir terlibat langsung dalam struktur politik. Kebijakan-kebijakan Benazir inilah yang akan memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini hak-haknya tersebut tidak terdengarkan oleh pemerintah sebelumnya. Maka dari itu Benazir berusaha agar perempuan-perempuan Pakistan ini mampu ikut berkontribusi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Benazir, sehingga hak-hak mereka pun dapat terwujud.

3.3.1 Kebijakan Benazir Bhutto

Dalam dunia politik Pakistan sebelum Benazir Bhutto menjabat, hak-hak perempuan tidak pernah terdengar oleh pemerintah serta ruang lingkup mereka sangat dibatasi. Terlebih pada masa pemerintahan Zia yang dapat dikatakan sebagai masa yang sangat mengekang perempuan

(Noss & Grangaard, 2016). Keadaan tersebut membuat Benazir termotivasi untuk bisa memperjuangkan hak-hak perempuan, oleh karena itu Benazir kemudian berusaha agar dirinya selalu terlibat aktif dalam perpolitikan Pakistan.

Pada tahun 1988, Benazir Bhutto terpilih sebagai Perdana Menteri di Pakistan. Benazir Bhutto dikenal sebagai perempuan pertama yang menyuarakan mengenai penegakkan demokrasi di Pakistan. Maka dari itu Benazir menjadi simbol perjuangan demokrasi di Pakistan (Nazneen & Sultan, 2014). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh sistem pemerintahan Pakistan di era sebelum Benazir sangat membatasi aktivitas perempuan dan hal itu juga mempengaruhinya dalam aktivitas proses politik di Pakistan.

Benazir memandang bahwa dengan adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, dapat mengurangi perkembangan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Sehingga kebijakan Benazir dalam meningkatkan partisipasi perempuan sangat menonjol pada masa pemerintahannya. Benazir mampu membuat perempuan aktif di politik yang mana pada masa Zia, perempuan tidak diperbolehkan untuk aktif di perpolitikan. Walaupun demikian, kebijakan Benazir dalam meningkatkan aktivitas perempuan dalam politik ini tidak dapat berjalan mulus sebab, partai-partai atau pendukung Zia banyak yang memberikan kecaman terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan Benazir yang menyangkut gender (Marsella, 2011, p. 136).

Beberapa bidang yang menjadi fokus kebijakan Benazir untuk mendorong partisipasi perempuan di politik. Pertama adalah pendidikan, karena melalui pendidikan akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga nantinya bisa membuka pemikiran masyarakat Pakistan menjadi luas dan terbuka. Dalam bidang pendidikan, Benazir memandang bahwa pendidikan di Pakistan belum bisa dirasakan oleh banyak perempuan. Hal itu dikarenakan, Benazir merasakan betapa susahya perempuan untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki di Pakistan. Oleh sebab itu melalui kebijakannya, Benazir mencoba memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Pakistan, agar perempuan dapat bersekolah selayaknya laki-laki. Kebijakannya menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan di bangku sekolah:

Pendaftaran	1988-1990	
	Male	Female
Sekolah Dasar	61,5%	38,4%
Sekolah Menengah Pertama	60,3%	39,6%
Sekolah Menengah Atas	67,5%	32,5%
Perguruan Tinggi	66,8%	33,1%

Tabel 3.3.1 Persentasi partisipasi perempuan dalam pendidikan era sebelum Benazir Bhutto (*Journal of International Women's Studies, 2016*).

Jika dibandingkan dengan angka partisipasi perempuan di bangku sekolah pada era sebelum Benazir yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, angka di atas menunjukkan peningkatan. Walaupun peningkatannya tidak cukup jauh, namun di era Benazir hingga setelahnya, angka partisipasi perempuan terus bertambah. Hal ini terlihat bahwa pengaruh Benazir dalam meningkatkan angka partisipasi perempuan terasa dampaknya di Pakistan. Keinginan Benazir untuk mencerdaskan perempuan-perempuan Pakistan bertujuan agar kualitas perempuan bisa setara dengan laki-laki. Sebab, jika mereka berpendidikan maka mereka akan bisa berpikir lebih terbuka, sehingga dapat mencetak generasi-generasi perempuan yang dapat mengubah Pakistan menjadi negara yang lebih baik (Khan, 2014).

Pengaruh Benazir dalam meningkatkan pendidikan di Pakistan masih terasa sampai sekarang. Sebagian besar perempuan-perempuan Pakistan sudah bisa mengenyam pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Banyaknya perempuan yang melanjutkan sekolahnya hingga ke luar negeri dengan tujuan agar ilmu yang mereka dapatkan di luar bisa dipergunakan di Pakistan. Namun, tidak semua perempuan dapat merasakan hal tersebut, hanya yang berasal dari keluarga dengan perekonomian menengah ke ataslah yang bisa sekolah tinggi hingga ke luar negeri. Meskipun demikian, perempuan dapat merasakan sekolah dan bisa menyelesaikan 12 tahun wajib sekolahnya. Sehingga bisa meningkatkan kualitas dari masyarakat Pakistan yang juga memiliki pemikiran yang lebih terbuka (Khan, 2014). Setiap warga negara memiliki

hak untuk mendapatkan kesempatan untuk dalam mendapatkan pendidikan.

Selain mendapatkan pendidikan yang layak, sebagai warga negara juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya. Hukum *hudood* yang diterapkan pada era Zia ini banyak menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia, diantaranya diskriminasi terhadap perempuan. Benazir sering menyuarakan mengenai keprihatinannya terhadap masalah diskriminasi terhadap perempuan. Benazirpun selalu memberikan kampanye untuk mengurangi angka-angka diskriminasi. Serta hal lain yang dilakukan Benazir ialah memberikan dukungan terhadap aktivis-aktivis perempuan sehingga mereka dapat sama-sama menyuarakan hak-haknya (Bajoria, 2011). Dalam periode pertama masa jabatannya yaitu tahun 1988 hingga tahun 1990, Benazir berusaha untuk secara bertahap menghapus kebijakan-kebijakan Zia yang diskriminatif seperti hukum *hudood*. Namun hal ini tidak mudah dilakukan sebab pengaruh Zia dan pendukungnya yang cukup besar menjadi penghalang Benazir untuk menghapuskan hukuman *hudood* di Pakistan. Banyaknya pendukung Zia yang menentang Benazir untuk menghapuskan hukum *hudood* tidak menghentikan keinginannya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Setelah masa pemerintahan Zia ditahun 1988, perubahan struktur politik Pakistan membawa peluang bagi representatif pada perempuan, yang awalnya hanya 3% naik menjadi 10%. Terdapat 22 kursi yang disediakan untuk perempuan di Majelis Nasional, yang terdiri dari 21

kursi yang melalui pemilihan tidak langsung dan 1 kursi untuk pemilihan langsung (Awan M. A., 2016, p. 2).

Benazir juga berhasil dalam melawan militer dan hal tersebut menjadi prestasi bagi Benazir, karena hal tersebut dikatakan tidak mudah dalam melawan militer. Pasukan militer selalu menjadi hal yang menakutkan, sehingga melihat tindakan Benazir yang mampu melawan kerasnya militer dianggap sebagai prestasi di masa pemerintahannya ini, (PPP, 2016).

Setelah mengurangi angka kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, Benazir juga fokus dalam membangun perekonomian di Pakistan. Kebijakan perekonomian yang dijalankan Benazir di masa pemerintahannya merupakan lanjutan dari kebijakan yang telah dibangun ayahnya. Kebijakan ekonomi yang telah dibangun Zulfikar Ali Bhutto dikatakan berhasil pada saat pemerintahannya, akan tetapi kebijakan tersebut tidak dilanjutkan pada pemerintahan Zia. Oleh karena itu, Benazir ingin membangun kembali sistem perekonomian yang sempat dibangun oleh ayahnya. Pada masa pemerintahan Zulfikar, ia mencoba menggerakkan semua masyarakatnya untuk ikut dalam membangun perekonomian Pakistan. Lulusan-lulusan ekonomi dan bisnis dipekerjakan, dengan upaya agar ilmu yang mereka dapatkan di bangku sekolah bisa secara langsung diaplikasikan ke negaranya. Sehingga pada masa pemerintahan Zulfikar banyak lapangan pekerjaan serta ekonomi bisnis berjalan dengan baik. Sama hal dengan ayahnya, Benazir melanjutkan kebijakan yang serupa dengan ayahnya. Benazir juga berupaya dalam

melindungi industri dalam negeri sehingga para pekerja tersebut bisa tetap mendapatkan pekerjaan yang layak (Dawn, 2008).

Benazir berpendapat bahwa terciptanya lapangan pekerjaan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Pakistan dan juga dapat meningkatkan angka perekonomian di Pakistan. Keberhasilan di era Benazir ialah dapat dilihat dari peluang lapangan pekerjaan terbuka luas untuk perempuan, yang mana mereka bisa ikut berpartisipasi menjadi politikus, menjadi anggota partai, dan meningkatkan pergerakan perempuan. sehingga dengan begitu bisa meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik di Pakistan. Serta beberapa perempuan lainnya sudah bisa menjadi polisi, bekerja di bank, menjadi pengacara serta dalam pusat-pusat studi di universitas sudah bisa mengangkat studi tentang perempuan. Dan setelah 20 tahun, Beijing akhirnya memberikan bantuan kepada LSM yang di dalamnya ada perempuan. Tujuannya agar mereka bisa mengembangkan perekonomiannya melalui bantuan yang diberikan (Nazneen & Sultan, 2014).

Benazir memberikan banyak dukungan terhadap perempuan-perempuan di Pakistan untuk bisa memotivasinya untuk ikut berpartisipasi dalam perpolitikan. Dari bidang pendidikan, angka partisipasi perempuan terus bertambah, sehingga bisa menjadikan perempuan Pakistan memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Hal tersebut bisa membuka peluang besar untuk perempuan agar bisa ikut berpartisipasi dalam politik Pakistan, yang mana dulu mereka dibatasi untuk ikut berpartisipasi. Kehadiran Benazir dalam membawa perubahan di perpolitikan Pakistan menjadikan

perempuan Pakistan tumbuh menjadi perempuan yang bisa menyuarakan hak-haknya.

Meskipun Benazir membawa perubahan terhadap partisipasi perempuan dalam politik Pakistan, namun di sisi lain beberapa masyarakat dan partai oposisi lainnya juga tidak setuju dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Sebagai contoh ialah *Pakistan Muslim League* (PML-J). PML memiliki pandangan yang berbeda dengan Benazir dalam menjalankan sistem pemerintahan. Sehingga PML-J berusaha agar pemerintahan di bawah Benazir segera diberhentikan. Kurang lebih 20 bulan, Benazir mampu memimpin Pakistan dengan segala upayanya mempertahankan apa yang telah menjadi kebijakannya agar melihat perkembangan dalam partisipasi perempuan di Pakistan. Namun hal tersebut rupanya tidak didukung oleh PML-J, yang mana juga menjadi partai oposisi dari PPP yang dijalankan Benazir pada saat itu (I.A.Rehman, 2017).

Namun terlepas dari pertentangan yang didapatkan Benazir, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Benazir dalam setiap kebijakan yang ia keluarkan tidak terlepas dari latar belakang yang mendorongnya menjadi politikus. Jika dilihat dari sudut pandang *personal empowerment*, kemampuan Benazir menjadi politikus Pakistan didasari oleh pengalaman masa lalu yang Benazir lihat dan rasakan, sehingga memotivasinya untuk membuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan Benazir ini berfokus untuk meningkatkan adanya partisipasi perempuan ke dalam politik Pakistan. Sehingga dalam sudut pandang *collective empowerment*,

kebijakan Benazir ini sebagai langkah awal Pakistan untuk mengubah sistem negaranya terdahulu. Meskipun pada dasarnya untuk mengubah sistem politik yang telah dibangun pada pemerintahan sebelumnya secara signifikan sangat sulit. Namun, Benazir telah membawa perubahan yang berarti, terlebih semangat dan keseriusan Benazir untuk memperjuangkan hak-hak perempuan melalui kebijakan-kebijakannya hingga saat ini terus ditingkatkan. Terbukti kepemimpinan setelah Benazir, isu kesetaraan gender di Pakistan menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah agar perempuan di Pakistan terus mendapatkan hak-haknya.

3.4. Efektivitas Upaya Penguatan Gender Oleh Benazir Bhutto

Melihat kepemimpinan Benazir Bhutto di periode pertamanya, Benazir banyak menemukan hambatan-hambatan dalam menjalankan kebijakan yang dikeluarkannya. Namun hambatan tersebut tidak menghentikan niat Benazir untuk menjalankan kebijakannya tersebut. Keinginan yang besar Benazir untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik ini mulai dibangun pada periode pertama kepemimpinannya. Namun di periode pertama, Benazir belum mampu menghapus sepenuhnya pengaruh dari kebijakan Zia yaitu hukum *hudood*. Adanya hukum *hudood* di Pakistan ini menyebabkan adanya peningkatan terhadap angka diskriminasi terhadap perempuan. Hal inilah yang menjadikan hambatan perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam perpolitikan Pakistan. Namun sebelum menjalankan kebijakannya tersebut, Benazir diturunkan dari jabatannya sehingga upayanya dalam menghapuskan diskriminasi di Pakistan terhenti pada saat itu.

Berbekal dari kebijakannya pada periode sebelumnya, setelah menjabat kembali di periode keduanya pada tahun 1993, Benazir kembali membangun kebijakannya yang sempat terhenti. Upayanya untuk menghapus angka diskriminasi di Pakistan, secara bertahap mulai terlihat. Pada periode keduanya, keseriusan Benazir untuk memperjuangkan perempuan di Pakistan dengan keberhasilannya meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) untuk pertama kalinya di tahun 1996 sejak berdirinya Pakistan. Keberhasilan Benazir dalam meratifikasi CEDAW, membuktikan bahwa Benazir ingin melindungi perempuan-perempuan di Pakistan serta dapat mengurangi angka kekerasan (Chairani, 2017).

Setelah berhasil meratifikasi CEDAW, Benazir mendapatkan penghargaan dari *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM). Hal ini dikarenakan melihat upaya Benazir dalam mengurangi angka diskriminasi terhadap perempuan, serta mendukung partisipasi perempuan untuk ikut serta di dalam proses pembuatan kebijakan di Pakistan. Sehingga pada periode kedua Benazir ini mampu menunjukkan hasil dari upayanya di periode pertama yaitu secara perlahan mampu menghapus angka diskriminasi terhadap perempuan dan juga perempuan-perempuan di Pakistan sudah mulai ikut berpartisipasi ke dalam perpolitikan Pakistan. UNIFEM dalam hal ini juga memberikan bantuan dana terhadap masyarakat Pakistan terutama perempuan, dengan tujuan dapat meringankan beban mereka yang menjadi korban diskriminasi selama ini. Pencapaian inilah yang menjadikan Benazir

sebagai Perdana Menteri perempuan di Pakistan yang berhasil dalam menerapkan kebijakannya, meskipun pencapaiannya ini bisa direalisasikan pada periode keduanya (DAWN, 2008).

Kebijakan Benazir selanjutnya yang terwujud pada periode kedua ialah Benazir mampu memperbaiki sistem pendidikan di Pakistan. Benazir mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi anggaran pembayaran sekolah. Sebab Benazir memandang bahwa dengan pembayaran sekolah yang mahal akan menjadi salah satu faktor kurangnya masyarakat Pakistan dapat mengenyam pendidikan yang layak. Upayanya ini juga bertujuan agar perempuan-perempuan di Pakistan mendapatkan kemudahan untuk bisa bersekolah, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak untuk bersekolah (PPP, 2009).

Berdasarkan dari ketiga dimensi *women empowerment* yaitu dimulai dari *personal empowerment*, yang mana akan melihat proses Benazir dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan masa lalunya sehingga dapat membentuknya menjadi pribadi yang lebih berkapasitas yang mampu dalam memberikan pengaruh terhadap perempuan-perempuan Pakistan. Selanjutnya *rational empowerment*, yang melihat bagaimana Benazir akhirnya mampu untuk masuk ke dalam PPP, sehingga Benazir mampu memberikan pengaruh terhadap anggota-anggota partainya. Dengan banyaknya yang mendukung kebijakan Benazir di dalam partainya, kemudian memberikan banyak dukungan diberikan kepada Benazir. Sehingga di dalam *collective empowerment* melihat Benazir yang akhirnya

terjun ke perpolitikan dengan kebijakan-kebijakannya yang bertujuan untuk menghapuskan angka diskriminasi dan meningkatkan angka partisipasi perempuan. Sehingga keikutsertaan Benazir ke perpolitikan Pakistan, membuatnya mampu mengubah struktur politik yang ada di Pakistan.

Berdasarkan ketiga dimensi di atas, Rawlands kemudian membagi atas 4 power yang berasal dari *empowerment* yaitu *power to*, *power over*, *power with* dan *power within*. Dari keempat *power* menurut Rawland inilah yang akan digunakan untuk melihat bagaimana proses *empowerment* yang dilakukan oleh Benazir. Dalam klasifikasi *power over* melihat bahwa Benazir mampu merubah struktur-struktur kebijakan yang ada di Pakistan. Kebijakan tersebut diubah agar Pakistan bisa mencapai nilai-nilai demokrasi. Sehingga tidak ada lagi ketidaksetaraan gender. *Power to* akan melihat bagaimana Benazir dalam mengumpulkan kekuatannya sehingga dalam hal ini Benazir mampu dalam menciptakan adanya tindakan baru dalam upaya memperjuangkan hak-hak perempuan. Hal ini bisa dilihat bahwa pada era sebelum Benazir, isu pemberdayaan perempuan belum menjadi isu utama dalam kebijakan Pakistan, sehingga angka diskriminasi terhadap perempuan semakin meningkat.

Selanjutnya *power with* ini akan melihat bagaimana Benazir mampu merangkul perempuan-perempuan Pakistan agar bisa membangkitkan semangat dalam memperjuangkan hak-haknya. Salah satunya ialah Benazir membantu aktivis-aktivis perempuan agar bisa mencapai tujuannya bersama. Sehingga dengan begitu antara Benazir dan

perempuan-perempuan Pakistan dapat memiliki kekuatan yang besar dalam mengubah sistem yang ada di Pakistan, sehingga perempuan di Pakistan bisa menggapai hak-haknya. Melalui *power from within* akan melihat proses kekuatan yang dibangun oleh Benazir sehingga memberikan adanya kekuatan spiritual. Hal ini bisa dilihat bagaimana Benazir mampu mewujudkan demokrasi di tengah-tengah negara Islam. Benazir yang agamawan selalu mengaplikasikan nilai-nilai Islam di setiap kebijakannya, akan nilai-nilai Islam ini berbeda dengan yang dipahami oleh pemerintah sebelumnya. Menurut Benazir, Islam selalu mengajarkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta untuk mewujudkan negara yang Islami seharusnya melakukan musyawarah untuk memecahkan suatu masalah di suatu negara, yang artinya adalah sangat diperlukan partisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam proses permusyawaratan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pakistan merupakan negara Islam yang menganut budaya patriarki, yang mana laki-laki memiliki kekuasaan dan lebih mendominasi dibandingkan perempuan. Hal tersebut menjadikan alat untuk membatasi perempuan. Budaya patriarki yang ada di Pakistan, menjadikan angka diskriminasi terhadap perempuan semakin bertambah. Perempuan di Pakistan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak bersama muhrimnya. Peran antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh tradisi budaya dan agama, yang hal itu kerap disalahartikan oleh pemerintahannya. Hal ini membuat Benazir ingin menjadikan Pakistan sebagai negara yang demokrasi, sehingga perempuan dan laki-laki akan memiliki kesempatan yang sama terutama kesempatan dalam berpolitik.

Berdasarkan analisis skripsi ini dengan menggunakan konsep *women empowerment*. Dalam konsep *women empowerment* ini akan melihat tiga dimensi dalam pembentukan empowerment di suatu negara. Pertama *personal empowerment*, yang mana akan melihat proses Benazir dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan masa lalunya sehingga dapat membentuknya menjadi pribadi yang lebih berkapasitas yang mampu dalam memberikan pengaruh terhadap perempuan-perempuan Pakistan. Hal lainnya ialah Benazir belajar dari masa lalu yang ia rasakan terdahulu sehingga mendorongnya untuk mengubahnya. Kemampuannya tersebut yang mampu menjadikan sebagai pribadi yang mampu dalam menyumbangkan

kebijakannya sehingga dapat merubah struktur-struktur yang ada di era sebelumnya.

Selanjutnya *Rational empowerment* ialah melihat bagaimana Benazir dalam memberikan pengaruhnya tersebut di kalangan anggota-anggota PPP. Sehingga dengan banyaknya dukungan yang ia dapatkan, dapat membantunya untuk bisa terpilih dalam proses pemilu di Pakistan. Benazir juga memberikan dukungan terhadap aktivis-aktivis perempuan, sehingga Benazir bersama aktivis-aktivis ini bisa sama-sama mengubah Pakistan menjadi negara yang demokrasi. Dengan tercapainya nilai demokrasi ini dapat mengurangi ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Sebab dengan ketidaksetaraan inilah yang menjadi faktor dari kurangnya partisipasi perempuan di perpolitikan Pakistan.

Dan yang terakhir melihat dari *collective empowerment*, yang mana Benazir yang akhirnya terjun ke perpolitikan dengan kebijakan-kebijakannya yang bertujuan untuk menghapuskan angka diskriminasi dan meningkatkan angka partisipasi perempuan. Sehingga keikutsertaan Benazir ke perpolitikan Pakistan, membuatnya mampu mengubah struktur politik yang ada di Pakistan. Terpilihnya Benazir sebagai politikus di Pakistan ini menjadi langkah awal perubahan dari struktur yang ada di era sebelum Benazir. Benazir juga mampu merangkul masyarakat Pakistan untuk ikut mengubah struktur tersebut.

Berdasarkan ketiga dimensi di atas, penulis menyimpulkan keempat dari power yang dikategorikan Rawlands dalam proses empowerment ini sesuai dalam menganalisis proses *empowerment* oleh Benazir. Sehingga dengan kekuatan-kekuatan Benazir inilah yang mampu menjadikan Benazir sebagai sosok yang

mampu dalam mengubah kebijakan yang ada sebelumnya. *Power over* melihat proses Benazir dalam kemampuannya mengubah kebijakan sebelumnya. Selanjutnya, *power to* akan melihat kemampuan Benazir dalam mengumpulkan kekuatannya untuk menciptakan tindakan baru. Sehingga dalam hal ini berhasil mampu menciptakan kebijakan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Lalu *power with* melihat upaya Benazir yang mampu merangkul perempuan-perempuan Pakistan, sehingga dengan memiliki tujuan yang sama ini mereka dapat memperjuangkan hak-haknya. Serta *power from within* ini akan melihat proses kekuatan yang dibangun oleh Benazir sehingga memberikan adanya kekuatan spiritual. Hal ini bisa dilihat bagaimana Benazir mampu mewujudkan demokrasi di tengah-tengah negara Islam. Benazir yang agamawan selalu mengaplikasikan nilai-nilai Islam di setiap kebijakannya, akan nilai-nilai Islam ini berbeda dengan yang dipahami oleh pemerintah sebelumnya.

Meskipun pada dasarnya untuk mengubah sistem politik yang telah dibangun pada pemerintahan sebelumnya secara signifikan sangat sulit. Kegigihan Benazir dalam membawa perubahan terutama pada angka partisipasi perempuan di Pakistan dikatakan berhasil di bawah kepemimpinannya. Sehingga dampak yang diberikan dari masa pemerintahan Benazir ini dapat dirasakan oleh perempuan-perempuan di Pakistan, yang mana mereka diberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan negara.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan di atas. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan

yang menyebabkan kesimpulan dari skripsi ini secara spesifik hanya dapat digunakan dalam diskusi terkait Partisipasi Politik di Pakistan pada periode pertama Benazir Bhutto. Sehingga sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terkait bagaimana dalam partisipasi perempuan di perpolitikan Pakistan pada periode kedua Benazir Bhutto. Sehingga dapat menjadi pembanding dalam melihat bagaimana pengaruh Benazir dalam meningkatkan partisipasi perempuan di perpolitikan Pakistan dan juga memperjuangkan hak-hak perempuan.

Daftar Pustaka

- Aftab, S. (2012). *CIDOB International Yearbook*. Barcelona.
- Ali, Z. (2008). *Tragedi Benazir Bhutto*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Amal, T. A., & Panggabean, S. R. (2004). *Politik Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arif, G. K. (1995). *Working With Zia: Pakistan's Power Politics 1977-1988*. New York: Oxford University Press.
- Awan, M. A. (2016). Political Participation of Women in Pakistan. *Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam*, 1-2.
- Awan, S. Z. (2016). Relevance of Education For Women's Empowerment in Punjab, Pakistan. *Journal of International Women's Studies*, 210.
- Baehr, P. (1995). *Major International Human Rights Instruments*. Netherland: USAID.
- Bhutto, B. (2008). *Reconciliation Islam, Democracy, and the West*. United States: Harper Collins.
- Bhutto, B. (2008). *Reconciliation: Islam, Democracy and the West*. Sydney, Australia: Simon & Schuster.
- Bibler, S., Mohan, V., & Ryan, K. (2014). Kesetaraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu. *United States Agency International Development (USAID)*, 5.
- Britannica. (n.d.). *Government and Society in Pakistan*. Retrieved from Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/place/Pakistan/Government-and-society>
- Burki, S. (2013). *The Politics of State Intervention: Gender Politics in Pakistan, Afganistan and Iran*. United State of America: Lexington Books.
- Cash, N. (1996). Benazir Bhutto: Former Prime Minister of Pakistan. *Academy of Achievement*.
- Chairani, M. (2017). *Hambatan Dalam Implementasi CEDAW di Pakistan Studi Kasus Honour Killing*. Surabaya.
- Chengappa, B. M. (2004). *Pakistan, Islamisation, Army and Foreign Policy*. New Delhi: APH Publishing Corporation.
- Dawn. (2008). *Benazir's Economic Legacy*. Dawn News.
- Dearden, L. (2016, April 5). 'Rampant' Violence Against Women in Pakistan Revealed as Groups Fight 'Un-Islamic' Law Against Domestic Abuse. Retrieved from Independent:

<http://www.independent.co.uk/news/world/asia/rampant-violence-against-women-in-pakistan-revealed-as-groups-fight-un-islamic-law-against-domestic-a6969311.html>

- Elashi, N. (2014, October 20). *Women's Political Participation in Pakistan*. Retrieved from Know Politics: <http://iknowpolitics.org/en/discuss/opinion-pieces/womens-political-participation-pakistan>
- Englar, M. (2006). *Benazir Bhutto: Pakistani Prime Minister and Activist*. United States of America: Compass Point Books.
- Esposito, J. L., & Voll, O. J. (1996). *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Fremson, R. (2016, June 21). *Benazir Bhutto, the Muslim World's First Female Leader*. Retrieved September 12, 2018, from The New York Times: <https://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/obituaries/archives/benazir-bhutto>
- Hadi, A. (2017). Patriarchy and Gender-Based Violence in Pakistan. *ResearchGate*, 297-298.
- Hamdi, A. S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Husna, N. (2010, Juli 5). *Hak Politik Perempuan Islam Menurut Benazir Bhutto*. Retrieved from Thesis UIN Sunan Kalijaga: <http://digilib.uin-suka.ac.id/6986/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Hussain, Y. (2008). *The Assassination of Benazir Bhutto*. New Delhi: Epitome Books.
- I.A.Rehman. (2017). *Special Report: Daughter of the East 1988-1990/1993-1996*. Dawn The Media Group.
- Indonesia, R. K. (2008, May 07). *Peran Politik Perempuan di Malaysia, Pakistan dan Indonesia*. Retrieved from Kabar Indonesia: <http://kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20080507224323>
- KBRI. (2015). Profil Negara Pakistan. *Embassy of The Republic of Indonesia in Islamabad, Pakistan*.
- Khan, M. S. (2014, December 21). *Women Empowerment Through Education*. Retrieved August 26, 2018, from Pakistan Today: <https://www.pakistantoday.com.pk/2014/12/21/women-empowerment-through-education/>
- Khuhro, A. A., & Soomro, A. N. (2013). The Role of Benazir Bhutto in the Movement for The Restoration of Democracy: An Analysis. *International Journal of Social Science and Humanity*, 275.

- Lewis. (2011). *The Gender Dividend: A Business Case For Gender Equality*. *UN Women The Gender Dividend*, 7.
- Mahmood, S. (1990). *Constitutional Foundation*. Lahore: Jang Publishers.
- Mernissi, F. (1987). *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. Bloomington: Indiana University Press.
- Munif, A. (2007). *50 Tokoh Politik Legendaris Dunia*. Yogyakarta.
- Munoz, H. (2014). *Getting Away with Murder: Benazir Bhutto's Assassination and The Politics of Pakistan*. New York: W. W. Norton and Company.
- Naden, C. J. (2011). *Leading Women: Benazir Bhutto*. New York: Marsha Cavendish Benchmark.
- Nazaeia-i- Pakistan. (t.t). *Women in Pakistan*. Retrieved August 29, 2018, from Nazaria-i-Pakistan Trust: <http://www.nazariapak.info/Women-Pakistan/Women.php>
- PILDAT. (2004). *Women Representation in Pakistan in Parliament*. Lahore: <http://www.pildat.org/>.
- PPP. (2016, Oktober). *About PPP*. Retrieved September 12, 2018, from Pakistan Peoples Party: <https://www.ppp.org.pk/about-ppp/>
- Santoso, L. (2016). *Rekonsiliasi Islam dan Demokrasi: Narasi Politik Benazir Bhutto*. Ponorogo.
- Shah, M. A. (1997). *The Foreign Policy of Pakistan: Ethnic Impacts on Diplomacy 1971-1994*. London: I.B. Tauris.
- Shaheed, F., & Mumtaz, K. (1987). *Women of Pakistan: Two Steps Forward, One Step Back?* Zed Book.
- Sirait, I. K. (2013). *Pemikiran Politik Benazir Bhutto Tentang Negara dan Perempuan*. *Dinamika Politik*.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sukardi, I. (2010). *Islam dan Civil Society*. Surakarta.
- Sumairs. (2007, April). *Pakistan's History From 1947-till Present*. Retrieved from CSS Forum Civil Service of Pakistan: <http://www.cssforum.com.pk/css-compulsory-subjects/pakistan-affairs/12015-pakistans-history-1947-till-present.html>
- Syarifudin. (2007, Desember 28). *Sejarah Berdarah Klan Bhutto*. *Okezone News*.
- Tarar, M. G., & Pulla, V. (2014). *Patriarchy, Gender Violence and Poverty Amongst Pakistani Women: A Social Work Inquiry*. *International Journal of Social Work and Human Services Practice*, 57.

- Thohari, F. (2018). *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish .
- Wardah, F. (2017, March 21). *Keterwakilan Perempuan di Parlemen Masih Rendah*. Retrieved August 30, 2018, from VOA Indonesia:
<https://www.voaindonesia.com/a/keterwakilan-perempuan-di-dpr-masih-rendah-/3775044.html>
- Weaver, M. (2008, September 13). *Pakistan: A History of Political Violence*. Retrieved from The Guardian:
<https://www.theguardian.com/world/2008/sep/03/pakistan2>
- Zadi, S., & Awan, Z. (2016). Impact of Zia Ul-Haq's Gender Policies on Pakistani Society. *Pakistan Journal of History and Culture*, 23.
- Zakaria, R. (1989). *The Trial of Benazir*. Bombay Popular Prakashan.